



2020

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Palu**

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika





Laporan Akuntabilitas Kinerja
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu



RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun 2020 ini disusun untuk melengkapi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun 2020 yang telah disepakati antara Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Palu 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	50%
		2. Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35%
		3. Presentase (%) Jumlah ISR Termonitor	60%
		4. Presentase % hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%
		6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR (tetap dan transportable)	12 Laporan
		7. Persentase (%) penanganan gangguan Frekuensi Radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	100%
		8. Persentase (%) penertiban frekuensi radio	50%
		9. Monitoring perangkat telekomunikasi	1 Kegiatan
		10. Persentase (%) Peserta Sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI	80%
		11. Persentase (%) pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100%
		12. Penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio	12 Laporan
		13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 Laporan
		14. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi radio terkait validasi data ISR	85%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86 (dari skala 100)

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Terdapat 14 indikator kinerja pada Sasaran Kinerja “Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”. Berikut ringkasan capaian untuk masing-masing indikator.

1. Persentase (%) Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2020 Direktur Jenderal SDPPI menetapkan target persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota sebesar 50 %. Untuk mencapai target persentase okupansi yang telah ditetapkan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu yang memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 13 kabupaten/kota harus melakukan kegiatan monitoring okupansi penggunaan frekuensi radio pada 7 Kabupaten/Kota.

Capaian persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 200 % dari target yang telah ditentukan dimana jumlah kabupaten/kota yang termonitor okupansi sebanyak 13 Kabupaten/Kota atau 100 % dari total 13 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu.

2. Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja

Indikator Kinerja Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja memiliki target sebesar 35 % untuk tahun 2020. Terdapat sebanyak 60 (enam puluh) ISR stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu sehingga untuk mencapai target yang telah ditetapkan, jumlah stasiun radio dan televisi siaran yang harus terukur di wilayah Sulawesi Tengah adalah sebanyak 21 stasiun.

Capaian persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 238.1 % dari target yang telah ditentukan dimana jumlah stasiun terukur sebanyak 54 stasiun atau 83.33 % dari total 60 stasiun radio dan televisi siaran di wilayah Sulawesi Tengah.

3. Persentase (%) Jumlah ISR yang Termonitor

Penugasan monitoring ISR yang dimulai dari pita FM sampai dengan pita potensi Broadband 5 GHz (kecuali *microwave link*) ditargetkan sebesar 60% pada tahun 2020. Jumlah ISR yang harus termonitor pada wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II palu untuk pita penugasan tersebut adalah sebanyak 246 ISR dari total 409 ISR.

Capaian persentase (%) jumlah ISR yang termonitor di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 143.33% dari target yang telah ditentukan dimana sebanyak 350 ISR termonitor dari total target 409 ISR atau 86 %.

4. Persentase (%) Hasil Monitoring Frekuensi Yang Teridentifikasi

Pada tahun 2020 telah ditetapkan target untuk indikator kinerja Presentase hasil monitoring frekuensi teridentifikasi sebesar 90% Hal ini berarti, Untuk dapat mencapai target, sebanyak 90% frekuensi yang termonitor harus teridentifikasi.

Capaian persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu pada tahun 2020 adalah sebesar 111.11 % dari target yang telah ditentukan dimana jumlah frekuensi teridentifikasi sebanyak 350 frekuensi dari total 350 frekuensi termonitor atau sebesar 100 %.

5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT

Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur adalah faktor utama telaksananya kegiatan monitoring dan pengukuran frekuensi radio. Oleh karena itu, fungsi dan kinerja perangkat tersebut harus selalu terjaga. Pada tahun 2020 target indikator kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT ditetapkan sebesar 83 %.

Capaian indikator Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 117.23 % dari target yang telah ditentukan dimana realisasi indikator adalah sebesar 98.44 %.

6. Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio Setiap Stasiun SMFR Tetap dan *Transportable*

Salah satu bentuk pemanfaatan dari stasiun SMFR tetap dan *transportable* adalah dengan



melakukan monitoring okupansi 21 pita frekuensi. Pada tahun 2020 laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan *transportable* menjadi salah satu indikator dari Perjanjian Kinerja dengan target sebanyak 12 Laporan.

Capaian indikator Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan *transportable* Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 100% atau sebanyak 12 laporan monitoring frekuensi radio dari 2 stasiun SMFR *transportable* yang terkirim dari total target 12 laporan dalam setahun.

7. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keselamatan Penerbangan dan Maritim

Indikator persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim terkhusus untuk dinas penerbangan dan dinas maritim saja dengan target 100 % pada tahun 2020. Hal ini berarti pengukuran capaian kinerja indikator tersebut hanya berlaku untuk aduan gangguan pada dinas penerbangan dan dinas maritim. Namun bukan berarti aduan gangguan selain dari dinas penerbangan dan maritim tidak ditindaklanjuti.

Capaian indikator persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 100 % dimana tidak terdapat aduan gangguan frekuensi untuk dinas penerbangan dan maritim. Terdapat sebanyak 5 aduan gangguan di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu sepanjang tahun 2020 selain dinas penerbangan dan dinas maritim yang telah terselesaikan (*clear*).

8. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

Indikator persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio pada tahun 2020 memiliki target sebesar 50 %. Metode pengukuran untuk indikator persentase ini adalah jumlah pengguna ilegal menjadi berizin ditambah dengan jumlah pengguna ilegal menjadi *off air* dibagi jumlah pengguna ilegal secara keseluruhan.

Capaian persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 196 % dari target yang telah ditentukan dimana dari total 50

pengguna ilegal yang telah ditindaklanjuti 18 diantaranya telah mengurus ISR dan 31 menjadi *off air*. Realisasi indikator persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio hingga Bulan Desember sebesar 98 %.

9. Monitoring Perangkat Telekomunikasi

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah melakukan pengawasan standar alat dan perangkat telekomunikasi di wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan Monitoring Perangkat Telekomunikasi dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat telekomunikasi yang beredar di pasaran telah tersertifikasi atau belum. Target indikator monitoring perangkat telekomunikasi untuk tahun 2020 ditetapkan sebanyak 1 kali kegiatan.

Capaian indikator monitoring perangkat telekomunikasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 600 % dari target yang telah ditentukan dimana realisasi indikator sebanyak 6 kali kegiatan atau sebesar 96.76 %.

10. Persentase Peserta Sosialisasi Memahami Informasi Di Bidang SDPPI

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu. Sosialisasi dan bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait bidang spektrum frekuensi radio. Pada tahun 2020 indikator kinerja persentase peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI ditargetkan sebesar 80 %.

Capaian indikator persentase peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 112 % dari target yang telah ditentukan. Kegiatan sosialisasi yang telah terlaksana diikuti sebanyak 60 peserta dengan jumlah peserta yang memahami informasi di bidang SDPPI sebanyak 48 peserta atau 80 % yang diketahui dari hasil *post test* sosialisasi.

11. Pelaksanaan UNAR Regular Berbasis CAT

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu, dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat demi terwujudnya tertib administrasi perizinan. Saat ini kegiatan UNAR telah menggunakan sistem

komputerisasi atau dikenal dengan istilah *Computer Assisted Test* (CAT). Target Indikator kinerja Pelaksanaan UNAR regular berbasis CAT pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 100 %.

Capaian Pelaksanaan UNAR regular berbasis CAT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 100 % sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan jumlah peserta UNAR regular CAT sepanjang tahun 2020 sebanyak 186 orang.

12. Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio

Dalam perjanjian kinerja tahun 2020 target untuk indikator Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio ditetapkan sebanyak 12 Laporan.

Balai monitor Spektrum frekuensi Radio Kelas II Palu telah melakukan pendistribusian Surat Perintah Pembayaran (SPP), Izin Stasiun Radio (ISR), serta Surat Teguran (ST) kepada seluruh *client* yang berada di wilayah Sulawesi Tengah setiap bulannya.

Capaian indikator penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 100 % sesuai target yang telah ditentukan dimana realisasi indikator sebanyak 12 laporan penanganan BHP frekuensi radio terkirim dari total target 12 laporan dalam setahun.

13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL

Selain melaksanakan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu juga melaksanakan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah. Dalam hal pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku instansi yang menangani piutang negara. Pada tahun 2020 target indikator Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL ditetapkan sebanyak 4 laporan (1 laporan per triwulan).

Capaian indikator penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 100% sesuai target yang telah ditentukan

dimana realisasi indikator sebanyak 4 laporan Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL terkirim dari total target 4 laporan dalam setahun.

14. Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR

Pelaksanaan inspeksi stasiun radio bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian data teknis dan data administrasi antara pengguna frekuensi radio *microwave link* di lapangan dengan data Izin Stasiun Radio (ISR). Pada tahun 2020 target indikator Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio terkait data ISR ditetapkan sebesar 85 %.

Capaian indikator Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio terkait data ISR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 101.18 % dari target yang telah ditentukan dimana dari total 2825 data sampling sebanyak 1662 data sesuai ISR dan 768 data tidak sesuai ISR telah ditindaklanjuti atau sebesar 86 %.

Terdapat 1 indikator kinerja pada Sasaran Kinerja "Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif". Berikut ringkasan capaian indikatornya.

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada tahun 2020 target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan sebesar 86%. Nilai capaian IKPA diperoleh dari beberapa indikator yang menjadi dasar pembobotan oleh kementerian keuangan. Adapun indikator yang menjadi dasar pembobotan tersebut adalah dari segi penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, LPJ Bendahara, Renkars, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus dan Dispensasi.

Capaian indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 112.51% dari target yang telah ditentukan dimana nilai IKPA yang diperoleh dari hasil penilaian oleh kementerian keuangan adalah sebesar 96.76%.



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasdi dan Informatika dan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan berbagai indikator capaian yang dituangkan dalam LAKIN Tahun 2020, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja organisasi selama satu tahun. Capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu akan digunakan sebagai salah satu masukan untuk kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu disusun sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika.

Capaian indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah sebesar 112.51 % dari target yang telah ditentukan dimana nilai IKPA yang diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian Keuangan adalah sebesar 96.76 %.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sigi, Januari 2021

**KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO
KELAS II PALU**





DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	5
KATA PENGANTAR	10
DAFTAR ISI	12

01

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG	16
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	19
POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	21
SISTEMATIKA PELAPORAN	21

02

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS	24
SASARAN PROGRAM	26
PERJANJIAN KINERJA 2020	27

03

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI **31**

SASARAN 1. Meningkatnya Layanan Monitoring,
Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban
Serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio
dan Perangkat Telekomunikasi **32**

SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT
Monitor Spektrum Frekuensi Radio
yang Bersih, Efisien dan Efektif **60**

KINERJA LAINNYA **68**

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA **70**
TAHUN 2016 - 2019

04

PENUTUP

PENUTUP **74**

GALERI 76



01 PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Potensi dan Permasalahan Strategis
Sistematika Pelaporan



LATAR BELAKANG

Munculnya wabah Pandemi Covid-19 menyerang semua sektor, bukan hanya di sektor kesehatan, namun juga berdampak pada sektor yang lain seperti sektor ekonomi, keuangan, dan sosial (dengan bentuk interaksi barunya) serta sektor pendidikan. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional. Pada era *new normal*, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan masyarakat. Lancarnya koneksi internet tergantung kualitas jaringan yang disediakan oleh operator seluler dan pengelolaan frekuensi radio yang lebih efisien dan ketersediaan spektrum frekuensi radio yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Ditjen SDPPI melakukan penatakelolaan spektrum frekuensi radio secara efektif, efisien, dinamis, dan optimal melalui kegiatan penataan dan perencanaan serta pengawasan penggunaan spektrum. Pemantauan dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio penting untuk dilakukan guna membantu manajemen spektrum dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum serta mencari potensi sumber frekuensi baru. Hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Ditjen SDPPI.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu sebagai perpanjangan tangan dari Ditjen SDPPI mesti mengemban tugas dan fungsi yang telah dirumuskan dan disepakati. Atas tugas dan fungsi itu, direncanakan, dianggarkan, dan dilaksanakan secara konstruktif, sistematis, dan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban itu berwujud penjelasan secara rinci baik proses maupun hasil akhir. Proses mencakup perencanaan, pelaksanaan, penghitungan dan evaluasi. Sedangkan hasil lebih berorientasi pada *outcome*. *Outcome* sedapat mungkin dijelaskan secara kuantitatif yang didasarkan pada indikator yang tepat.

Meskipun akuntabilitas mengedepankan *outcome*, secara kualitatif juga harus mempertanggungjawabkan kualitas proses, antara lain, mekanisme perencanaan, sistem pengukuran dan penghitungan kinerja sampai dengan evaluasi,

juga perlu mendapat perhatian yang cukup.

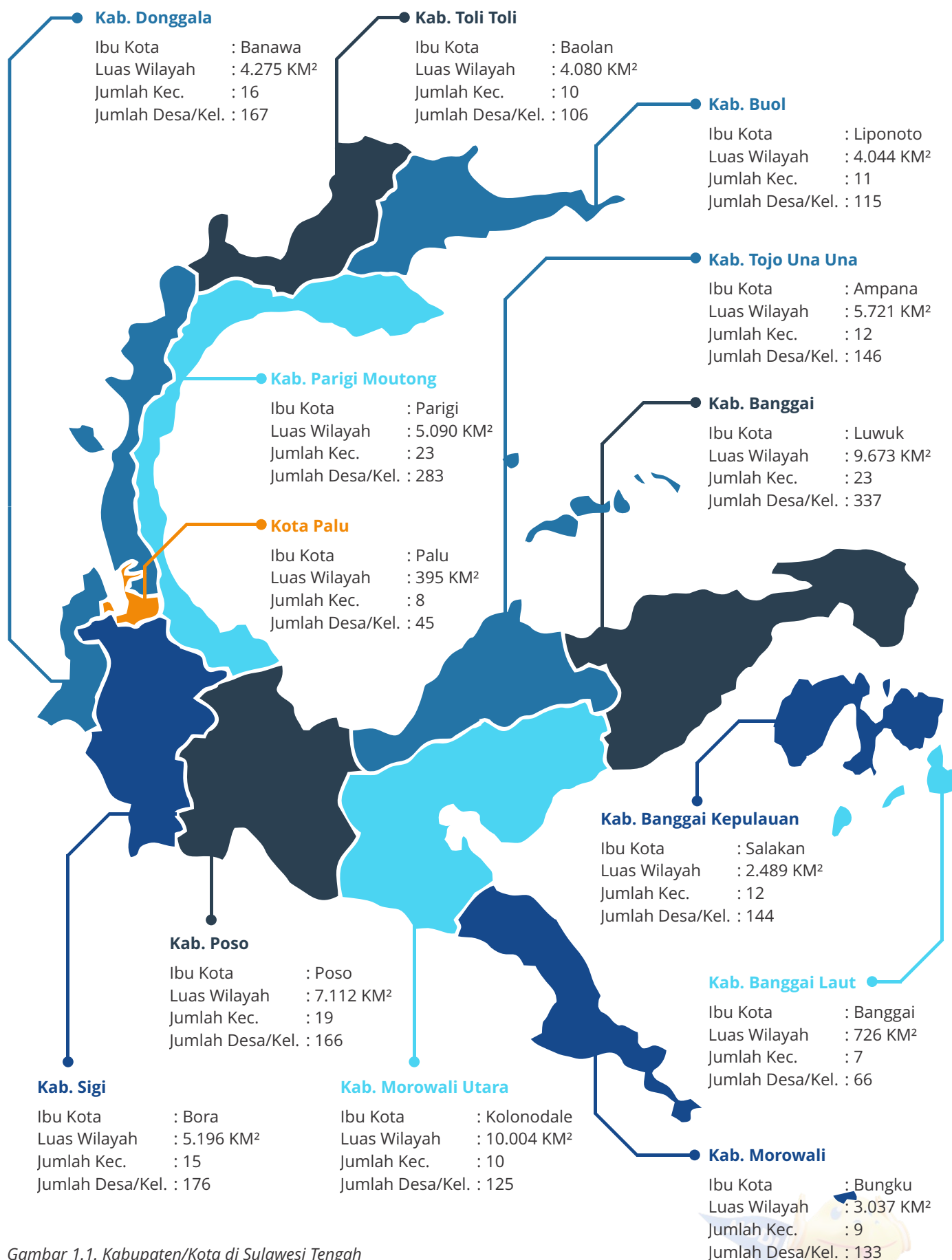
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan dapat mengevaluasi kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu instrumen pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN).

GAMBARAN UMUM WILAYAH SULAWESI TENGAH

Sulawesi Tengah merupakan propinsi terbesar di pulau Sulawesi, dengan luas wilayah daratan 68.033 km² yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta kepulauan Togian di Teluk Tomini dan Kepulauan Banggai di Teluk Tolo, dengan luas wilayah laut adalah 189.480 km² Propinsi Sulawesi Tengah terletak diantara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan, serta 119°22' dan 124°22' Bujur timur. Batas-batas wilayahnya:

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Propinsi Gorontalo
- Sebelah Timur : Propinsi Maluku
- Sebelah Selatan : Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat : Propinsi Sulawesi Barat dan Selat Makasar

Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan kota, 175 kecamatan yang telah terjangkau oleh layanan internet dan layanan seluler, dan 2.009 kelurahan/desa, sebagaimana dirincikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus pemerintah saat ini, termasuk infrastruktur telekomunikasi. Apalagi di tengah pandemi covid 19, kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi semakin berkembang. Jarak fisik atau jarak geografis tidak lagi menjadi faktor dalam hubungan antar manusia atau antar lembaga usaha. Operator seluler siap memenuhi kebutuhan layanan *broadband* yang terus meningkat di Sulawesi Tengah. Seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sudah tercakupi oleh layanan seluler dari Telkomsel, Indosat, dan XL seperti yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Potensi BTS Selular di Wilayah Sulawesi Tengah

No	Kab/Kota	Jumlah BTS/Site			
		Telkom	Telkomsel	XL Axiata	Indosat
1	Kota Palu	79	12	57	57
2	Kabupaten Sigi	26	17	26	13
3	Kabupaten Donggala	31	41	21	10
4	Kabupaten Parigi Moutong	30	87	54	26
5	Kabupaten Poso	32	38	30	15
6	Kabupaten Tojo Unauna	17	24	10	7
7	Kabupaten Banggai	53	76	0	34
8	Kabupaten Banggai Laut	14	0	0	0
9	Kabupaten Banggai Kepulauan	15	13	0	0
10	Kabupaten Morowali Utara	9	40	0	0
11	Kabupaten Morowali	28	48	0	4
12	Kabupaten Buol	17	24	7	0
13	Kabupaten Tolitoli	29	41	15	3
Total		380	461	220	169

Selain layanan telekomunikasi seluler, masyarakat Sulawesi Tengah juga sudah terjangkau oleh layanan TV Siaran *free to air* dan Radio Siaran FM yang menyebar di beberapa kabupaten/kota. Potensi perkembangan pertelekomunikasian di Sulawesi Tengah khususnya yang berbasis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 1.2. Potensi Stasiun Radio Konvensional

No	Kab/Kota	TV Siaran Analog	Radio Siaran FM	Stasiun Radio Konvensional	Fixed Service Point to Point
1	Kota Palu	14	18	185	205
2	Kabupaten Sigi	0	1	32	82
3	Kabupaten Donggala	3	0	88	103
4	Kabupaten Parigi Moutong	1	2	44	197
5	Kabupaten Poso	1	2	65	141
6	Kabupaten Tojo Unauna	0	3	40	58
7	Kabupaten Banggai	0	5	217	163
8	Kabupaten Banggai Laut	0	2	10	26
9	Kabupaten Banggai Kepulauan	0	0	76	28
10	Kabupaten Morowali Utara	0	1	9	49
11	Kabupaten Morowali	0	0	94	80
12	Kabupaten Buol	0	1	20	48
13	Kabupaten Tolitoli	0	4	40	92
Total		19	39	920	1272

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring spektrum frekuensi radio mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo No. 15 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 2 tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut bahwa UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktur Operasi Sumber Daya.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dipimpin oleh Kepala dan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;
- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II;
- Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program;
- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;

- Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

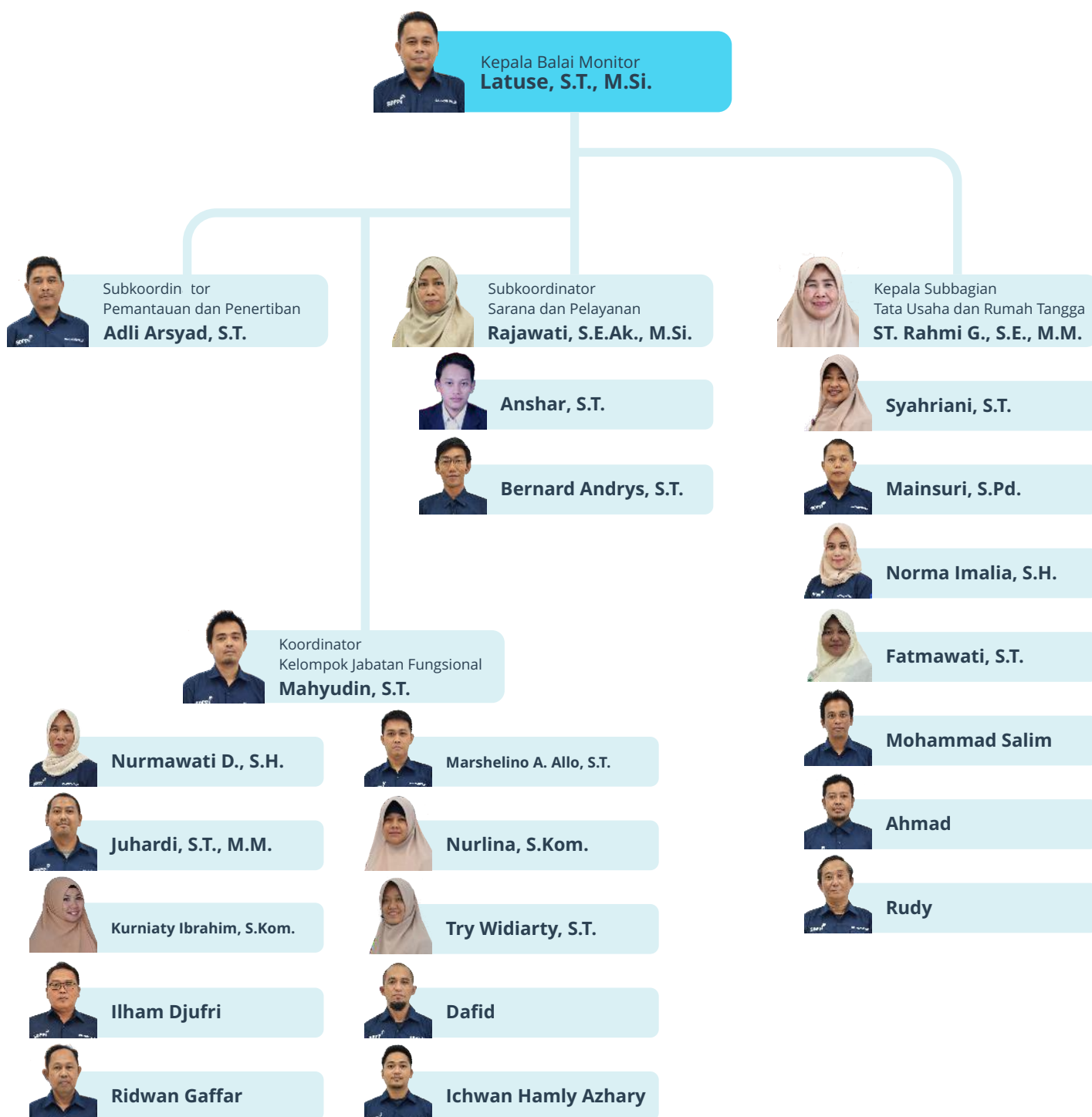
3. Seksi Sarana dan Pelayanan

mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Adanya transformasi digital dan layanan *broadband* terutama *wireless broadband* akan menyebabkan terjadinya ledakan kebutuhan *bandwidth* yang berdampak pada kebutuhan alokasi spektrum frekuensi yang besar, kinerja industri, kebutuhan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan ekosistem industri secara menyeluruh. Potensi *mobile broadband* dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi *broadband* berbasis kabel. Dengan demikian, penyiapan regulasi dan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan yang efisien dan efektif bagi spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya yang terbatas sangat penting untuk dilakukan.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam

mengelola dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada spektrum frekuensi radio

- Penyalahgunaan kebijakan spektrum frekuensi;
- Belum efisiennya proses perizinan spektrum frekuensi;
- Permasalahan terkait keselamatan maritim dan penerbangan;
- Gangguan interferensi frekuensi radio;
- Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR);
- Belum semua pengguna frekuensi radio memahami sistem perizinan online;
- Keterbatasan perangkat monitoring yang sesuai penugasan monitoring;
- Sumber daya manusia yang belum siap dalam menghadapi perubahan transformasi digital

SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2020 meliputi:

- Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

- Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
- Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





02 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis
Sasaran Program
Perjanjian Kinerja Tahun 2020



RENCANA STRATEGIS

Sumber daya frekuensi merupakan sumber daya terbatas dan memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan pembangunan infrastruktur TIK dan peningkatan kecepatan akses layanan TIK, yang dapat digunakan oleh berbagai sektor industri untuk peningkatan ekonomi digital.

Bagi penyelenggara telekomunikasi, kepemilikan hak penggunaan spektrum frekuensi menjadi pilihan utama untuk melakukan efisiensi biaya pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan kualitas layanan. Dengan kepemilikan alokasi lebar pita frekuensi yang besar akan mengurangi pembangunan jumlah BTS yang berdampak pada penghematan biaya investasi pembangunan dan biaya operasi infrastruktur, *time to market* yang cepat, serta peningkatan kualitas layanan.

Bagi masyarakat, dengan adanya ketersediaan sumber daya frekuensi untuk peningkatan pembangunan infrastruktur TIK dan kecepatan akses layanan TIK akan memberikan manfaat penggunaan layanan untuk berbagai kepentingan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Bagi pemerintah, sumber daya frekuensi ini memiliki peran penting dalam peningkatan PNB dan mendorong tumbuhnya ekonomi di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat arah kebijakan dan strategi agar pemanfaatan frekuensi dapat memberikan manfaat bagi semua *stakeholder* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa arah kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya frekuensi dan perangkat TIK antara lain:

- Penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan *mobile broadband*
- Penyelesaian regulasi terkait spektrum frekuensi yang mendukung peningkatan konektivitas *broadband*
- Optimalisasi dan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk *public service* dan instansi pemerintah
- Penyusunan *masterplan* spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran digital

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) merupakan salah satu Ditjen yang berada dibawah Kementerian Kominfo sesuai Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas dan fungsi menciptakan terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi yang optimal dan mewujudkan industri komunikasi dan informasi yang berdaya saing dan ramah lingkungan melalui manajemen spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis, dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi yang inovatif yang memenuhi standar teknis.

Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, Ditjen SDPPI memiliki misi untuk 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan tatanan spektrum radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis *wireless broadband*.
- Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk frekuensi dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional.
- Mewujudkan pelayanan frekuensi dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.
- Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.
- Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi di bidang *wireless broadband*.
- Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.
- Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.
- Mengembangkan sistem stasiun monitoring frekuensi dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.
- Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional.

- Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI.

Untuk mewujudkan misi tersebut, ada sejumlah sasaran program yang diemban oleh Direktorat Jenderal SDPPI yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNPB Ditjen SDPPI
- Optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio
- Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
- Pengembangan ekosistem industri perangkat TIK
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Untuk mencapai sasaran program di atas, Direktorat Jenderal SDPPI melakukan rencana kegiatan yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan oleh Unit Pelaksana Teknis di seluruh wilayah Indonesia, yaitu:

1. Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio

Untuk mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, dinamis, dan optimal maka di butuhkan adanya layanan perizinan di bidang layanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat, dan benar secara profesional dan berintegritas. Hal ini akan meningkatkan partisipasi kontribusi sektor bisnis sebagai aktor utama.

UPT Balai Monitor sebagai garda terdepan dalam pelayanan spektrum frekuensi radio memberikan layanan pendampingan dan bimtek *e-licensing*, penyampaian *invoice*, menjaga perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) untuk mendukung kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio di UPT, menjamin operasional aplikasi *E-Licensing* untuk mendukung *Smart Service*, layanan pengaduan penyelesaian gangguan frekuensi radio dan penanganan pelanggaran standar perangkat telekomunikasi.

2. Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Frekuensi dan Perangkat TIK

Dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan publik bidang frekuensi dan perangkat TIK dibutuhkan peningkatan penyelenggaraan layanan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan ini diperoleh dari adanya layanan perizinan spektrum frekuensi radio dan layanan sertifikasi perangkat serta penyelesaian penanganan piutang BHP frekuensi radio yang

sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, diperlukan juga peningkatan layanan monitoring.

UPT sebagai perpanjangan tangan dari Dirjen SDPPI melakukan upaya pencegahan timbulnya piutang dengan selalu memantau penyelesaian tagihan oleh wajib bayar serta melakukan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio yang dilakukan oleh KPKNL. Selain itu, UPT juga melakukan peningkatan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi

3. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum

Pengelolaan keuangan, BMN dan Umum merupakan kegiatan untuk dukungan manajemen dan teknis yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen SDPPI dibantu oleh Unit Pelaksanaan Teknis sebagai dukungan teknis administratif yang sesuai dengan reformasi birokrasi. Layanan publik yang cepat, tepat, dan benar akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis telekomunikasi serta masyarakat sebagai pengguna jasa dan layanan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menetapkan arah kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, pengukuran, pemeriksaan (validasi) dan penertiban penggunaan frekuensi radio.
- Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan TIK.
- Peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
- Peningkatan kualitas pembinaan dan penertiban pengguna spektrum frekuensi radio illegal.
- Menjaga berfungsinya perangkat pendukung layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penanganan gangguan.
- Peningkatan sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan pemanfaatan teknologi /media sosial dalam desiminasi informasi.
- Melakukan *branding* dengan cara melakukan kunjungan ke para pengguna frekuensi radio.
- Melakukan *Survey* kepuasan publik serta bimtek *e-licensing* terkait pelayanan perizinan.
- Senantiasa melakukan analisa dan evaluasi untuk peningkatan tata kerja dan kualitas pelaksanaan tugas.



SASARAN PROGRAM

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah sasaran kegiatan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan kegiatan untuk satu tahun perencanaan.

Dalam sasaran kegiatan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut berikut:

1. Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran kegiatan tersebut, maka indikator kinerja yang akan digunakan yaitu:

- Persentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota dengan target 50% yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Jumlah Kab/Kota termonitor dibandingkan dengan $50\% \times \text{Total Kab/Kota}$)
- Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja dengan target 35% yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Jumlah stasiun siaran yang terukur dibandingkan dengan $35\% \times \text{jumlah izin stasiun siaran yang ada di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu}$)
- Presentase (%) Jumlah ISR Termonitor dengan target 60% yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Jumlah ISR termonitor dibandingkan dengan $60\% \times \text{total ISR}$)
- Presentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi dengan target 90% yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Jumlah yang teridentifikasi dibandingkan dengan $90\% \times \text{total jumlah yang termonitor}$)
- Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT dengan target 83% yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Jumlah perangkat yang berfungsi dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat yang ada di UPT)
- Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR (tetap dan *transportable*) dengan target 12 laporan yang diukur dengan:
(1 Laporan/bulan untuk setiap stasiun SMFR)
- Persentase (%) penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim dengan target 100% yang diukur dari

capaian pada indikator berikut:

(Jumlah gangguan yang diselesaikan)/(Jumlah total aduan gangguan)

- Persentase (%) penertiban frekuensi radio dengan target 50% yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Jumlah ilegal menjadi berijin ditambah ilegal menjadi off air dibandingkan dengan jumlah ilegal)
- Monitoring perangkat telekomunikasi dengan target 1 Kegiatan yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Jumlah kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi/target kegiatan monitoring telekomunikasi)
- Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI dengan target 80% peserta yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Jumlah peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI dibandingkan dengan peserta sosialisasi $\times 100\%$)
- Persentase (%) pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT dengan target 100% yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Jumlah pelaksanaan kegiatan UNAR dibanding jumlah rencana kegiatan UNAR $\times 100\%$)
- Penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio dengan target 12 laporan yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Jumlah laporan penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio 1 laporan/bulan)
- Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL dengan target 4 laporan yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Jumlah laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL dengan target 1 laporan/triwulan)
- Persentase (%) pelaksanaan inspeksi radio terkait validasi data ISR dengan target 85% yang diukur dari capaian pada indikator berikut:
(Data ISR Valid hasil inspeksi dibandingkan dengan Data ISR sampling inspeksi $\times 100\%$)

2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien, dan efektif.

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka indikator kinerja yang akan digunakan yaitu:

"Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 86%. Cara mengukurnya adalah penilaian yang akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan".

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada Tahun 2020 Perjanjian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu mengalami perubahan pada pertengahan tahun. Perjanjian Kinerja dapat disajikan pada tabel 2.1. Sedangkan untuk mendukung kinerja tahun 2020, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu mengalokasikan dana pagu sebesar **Rp. 10.394.618.000** yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Palu 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	50%
		2. Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35%
		3. Presentase (%) Jumlah ISR Termonitor	60%
		4. Presentase % hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%
		6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR (tetap dan transportable)	12 Laporan
		7. Persentase (%) penanganan gangguan Frekuensi Radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	100%
		8. Persentase (%) penertiban frekuensi radio	50%
		9. Monitoring perangkat telekomunikasi	1 Kegiatan
		10. Persentase (%) Peserta Sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI	80%
		11. Persentase (%) pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100%
		12. Penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio	12 Laporan
		13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 Laporan
		14. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi radio terkait validasi data ISR	85%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86 (dari skala 100)





03

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi
Kinerja Lainnya

Perbandingan Capaian Kinerja 2016 - 2020



Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja, karena merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitasnya. Pengukuran kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun 2020 dilakukan atas capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk perentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun 2020 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan capainnya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penetapan Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Palu 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	50%
		2. Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35%
		3. Presentase (%) Jumlah ISR Termonitor	60%
		4. Presentase % hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%
		6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR (tetap dan transportable)	12 Laporan
		7. Persentase (%) penanganan gangguan Frekuensi Radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	100%
		8. Persentase (%) penertiban frekuensi radio	50%
		9. Monitoring perangkat telekomunikasi	1 Kegiatan
		10. Persentase (%) Peserta Sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI	80%
		11. Persentase (%) pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100%
		12. Penanganan tagihan dan piutang BHP Frekuensi Radio	12 Laporan
		13. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 Laporan
		14. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi radio terkait validasi data ISR	85%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86 (dari skala 100)

Sasaran 1

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, dan Penertiban Serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

1. IK-1 Persentase (%) Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Sulawesi Tengah merupakan salah satu propinsi yang ada di Pulau Sulawesi yang memiliki 13 kabupaten/kota. Untuk tahun 2020, Balai monitor menargetkan observasi/monitoring ISR untuk seluruh kabupaten/kota. Observasi/monitoring frekuensi radio merupakan kegiatan yang terdiri dari:

- Pengamatan kepadatan pendudukan pita frekuensi radio sesuai dengan alokasinya baik HF, VHF, UHF maupun SHF secara rutin.
- Mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang berizin dan tanpa izin maupun penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Data Capaian Indikator Kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja IK-1

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase (%) Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio Di Kabupaten/Kota	50	100	200

Target PK yang harus dicapai adalah 80 % wilayah kabupaten/kota harus termonitor. Realisasi capaian kinerja sebesar 100% sehingga capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor : 47/DJSDPPI.4/SP.03.03/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 Perihal Penugasan Monitoring SFR Tahun 2020, terdapat 21 *subservice*/pita frekuensi radio yang harus dimonitor sebagaimana pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. 21 Band Frekuensi

No	Subservice	Pita Frekuensi
1	Maritim, Marabahaya	479 - 526.5 KHz
2	Radio AM	535 - 1606.5 KHz
3	Marabahaya	2173.5 - 2190.5 KHz
4	Penerbangan HF, Amatir	6525 - 11400 KHz
5	Radio FM	87.5 - 108 MHz
6	Penerbangan VHF	108 - 137 MHz
7	Konsesi, Maritim VHF	150 - 174 MHz
8	Televisi VHF, DAB	174 - 230 MHz
9	Tetap, Bergerak, Marabahaya	300 - 430 MHz
10	Komrad	430 - 460 MHz
11	Downlink Selular 450	460 - 470 MHz
12	Televisi UHF	478 - 806 MHz
13	Komrad, Downlink Selular 800	851 - 860 MHz
14	Downlink Selular 900	925 - 960 MHz
15	Downlink Selular 1800	1805 - 1880 MHz
16	Downlink Selular 2100	2110 - 2710 MHz
17	Selular, Broadband 2,3 GHz	2300 - 2400 MHz
18	Broadband, Siaran Satelit	2500 - 2690 MHz
19	BWA 3,3 GHz	3300 - 3400 MHz
20	Tetap, Sateli Tetap	3400 - 3700 MHz
21	Radar Cuaca, Broadband 5 GHz	5140 - 5925 MHz

Tabel 3.4. Hasil Observasi/Monitoring Tiap Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi Tengah

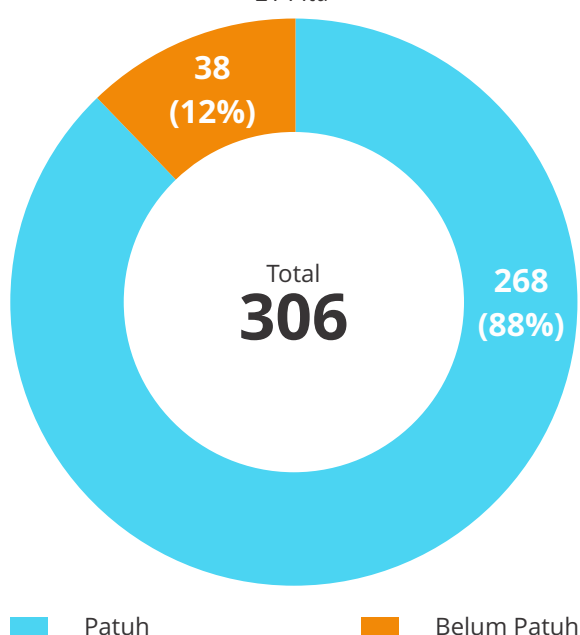
No	Pita	Hasil Observasi/Monitoring Tiap Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi Tengah											Total	
		Buol	Toli Toli	Morowali	Morowali Utara	Banggai Kepulauan	Banggai Laut	Banggai Palu	Parigi Moutong	Sigi	Poso	Donggala	Tojo Una Una	Total
1	Maritim, Marabahaya	479 - 526.5 KHz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Radio AM	535 - 1606.5 KHz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Marabahaya	2173.5 - 2190.5 KHz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penerbangan HF, Amatir	6525 - 11400 KHz	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
5	Radio FM	87.5 - 108 MHz	0	3	1	1	2	4	14	1	2	0	1	31
6	Penerbangan VHF	108 - 137 MHz	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	5
7	Konsesi, Maritim VHF	150 - 174 MHz	3	6	13	12	9	8	15	3	12	5	3	105
8	Televisi VHF, DAB	174 - 230 MHz	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
9	Tetap, Bergerak, Marabahaya	300 - 430 MHz	0	0	2	0	7	2	6	0	0	3	0	20
10	Komrad	430 - 460 MHz	2	2	0	0	0	0	4	1	0	0	1	10
11	Downlink Selular 450	460 - 470 MHz	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
12	Televisi UHF	478 - 806 MHz	0	0	0	0	0	0	12	0	12	2	0	27
13	Komrad, Downlink Selular 800	851 - 860 MHz	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	5
14	Downlink Selular 900	925 - 960 MHz	2	3	1	1	0	2	3	2	3	3	2	26
15	Downlink Selular 1800	1805 - 1880 MHz	2	2	1	2	2	2	3	2	3	2	1	25
16	Downlink Selular 2100	2110 - 2710 MHz	1	1	1	2	2	2	3	1	3	1	0	18
17	Selular, Broadband 2,3 GHz	2300 - 2400 MHz	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	6
18	Broadband, Siaran Satelit	2500 - 2690 MHz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	BWA 3,3 GHz	3300 - 3400 MHz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tetap, Satelit Tetap	3400 - 3700 MHz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Radar Cuaca, Broadband 5 GHz	5140 - 5925 MHz	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Out Of Range 21 Pita	0	0	0	3	2	0	1	5	1	2	0	3	19
Jumlah		10	18	23	13	26	17	24	69	12	35	23	24	306
Illegal		0	0	3	2	1	0	2	0	0	0	2	0	10
Legal		10	18	20	11	13	11	22	63	12	35	18	23	268
Tidak Sesuai ISR		0	0	0	0	12	6	0	6	0	0	3	1	28
Total		10	18	23	13	26	17	24	69	12	35	23	24	306



Hasil Observasi/Monitoring 21 pita *subservices* di wilayah Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.4., dimana *subservice* Konsesi, Maritim VHF (150 – 174 MHz) merupakan penggunaan frekuensi terbanyak yang termonitor. Penggunaan frekuensi radio pada *range* ini, pada umumnya digunakan untuk keperluan komunikasi oleh Pemerintahan, Swasta, BUMN, ataupun Organisasi. Pada *range* Maritim, Marabahaya (479 - 526.5 KHz); Marabahaya (2173.5 - 2190.5 KHz); *Broadband*, Siaran Satelit (2500 - 2690 MHz); BWA 3.3 GHz (3300 - 3400 MHz); Tetap, Satelit Tetap (3400 - 3700 MHz) tidak ditemukan penggunaan atau pendudukan pada saat melakukan kegiatan observasi/monitoring.

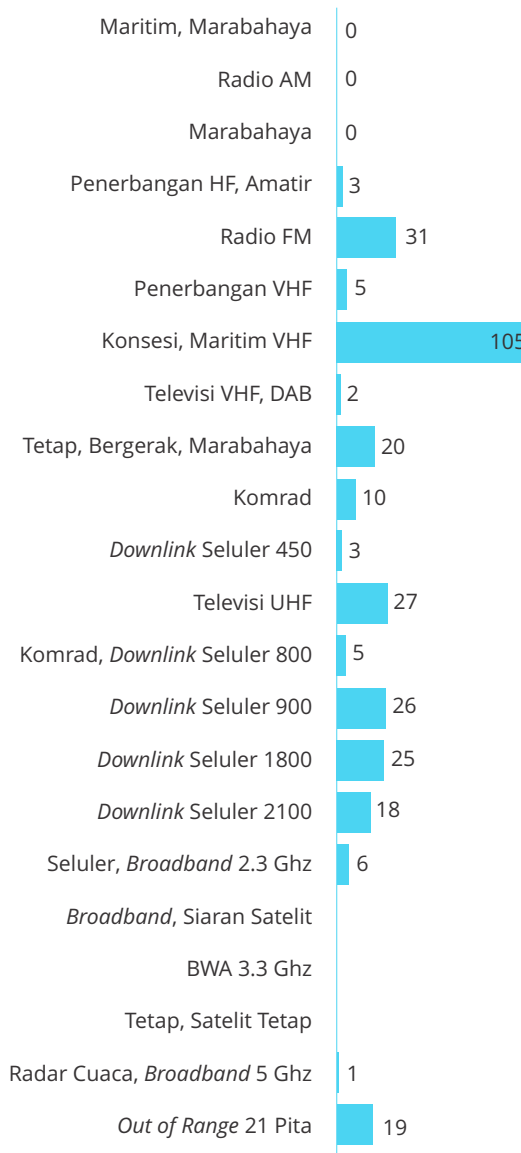
Dari total 306 Frekuensi Radio yang termonitor di 13 kabupaten/kota, 268 sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tetapi masih juga terdapat penggunaan frekuensi yang tidak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sebanyak 10 ilegal dan 28 tidak sesuai ISR. Secara persentase tingkat kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio cukup tinggi yaitu sebesar 88 %, sedangkan yang tidak patuh sebesar 12 %.

Grafik 3.1. Tingkat Kepatuhan Hasil Monitoring 21 Pita



Dengan melihat dan mengevaluasi hasil observasi/monitoring tersebut di atas, maka pelaksanaan untuk kegiatan ini, masih sangat perlu ditingkatkan dan diintensifkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal sehingga tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

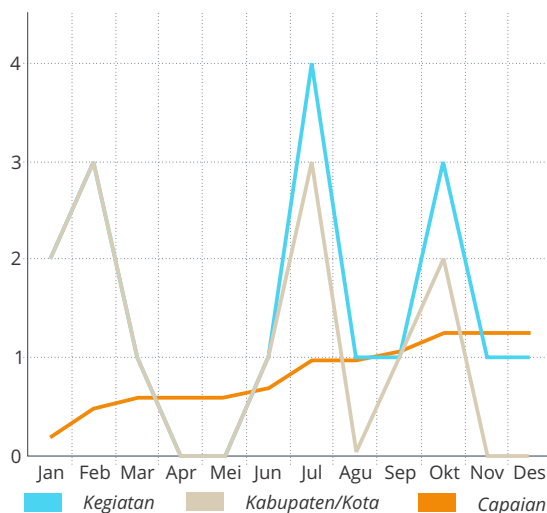
Grafik 3.2. Hasil Observasi/Monitoring Berdasarkan 21 Pita



Penempatan stasiun radio monitoring (*transportable*) untuk daerah yang sedang berkembang maupun tingkat kepadatan penduduk yang tinggi harus diprioritaskan, untuk dimanfaatkan melakukan monitoring secara *real time*.

Terhadap temuan yang menggunakan spektrum frekuensi radio tidak sesuai ketentuan yang berlaku, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu, senantiasa melakukan tindakan himbauan ataupun peringatan agar menggunakan frekuensi radio sesuai dengan aturan ataupun ketentuan yang berlaku, sehingga kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah dapat terwujud.

Grafik 3.3. Persentase Kabupaten/Kota Termonitor



2. IK-2 Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran Di Wilayah Kerja

Identifikasi dinas siaran dilakukan terpisah dengan identifikasi *land mobile private*, karena identifikasi dinas siaran terdapat banyak parameter teknis dan karakteristik pemancar yang harus diukur, untuk memastikan kesesuaian teknis dan administrasi dengan data ISR. Jumlah penggunaan pemancar *broadcast* di Sulawesi tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.6 dan peta sebarannya dapat dilihat pada peta 3.0 di bawah ini.

Maksud dan tujuan pengukuran spektrum frekuensi radio adalah:

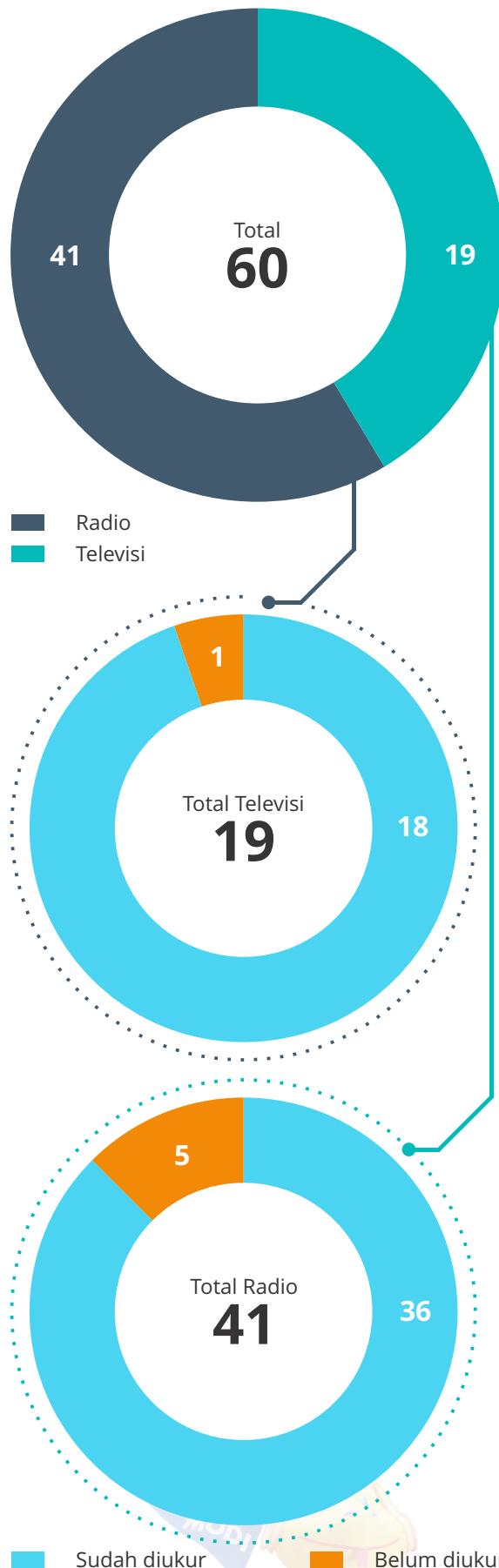
1. Mengetahui kesesuaian parameter teknis dan karakteristik pemancar dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengetahui jumlah penggunaan frekuensi yang sesuai dengan ISR yang telah ditetapkan untuk wilayah Sulawesi Tengah.
3. Tertib penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Jumlah *broadcast* yang menjadi target identifikasi pada tahun 2020 adalah 60 ISR (radio siaran 41 ISR dan tv siaran 19 ISR), dimana berhasil dilakukan identifikasi sebanyak 54 ISR, yang terdiri dari radio siaran 36 ISR dan tv siaran 18 ISR. Dan 6 ISR belum teridentifikasi karena *Off Air*.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja IK-2

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran Di Wilayah Kerja.	35	90	257

Grafik 3.4. Persentase ISR (Broadcast) Termonitor



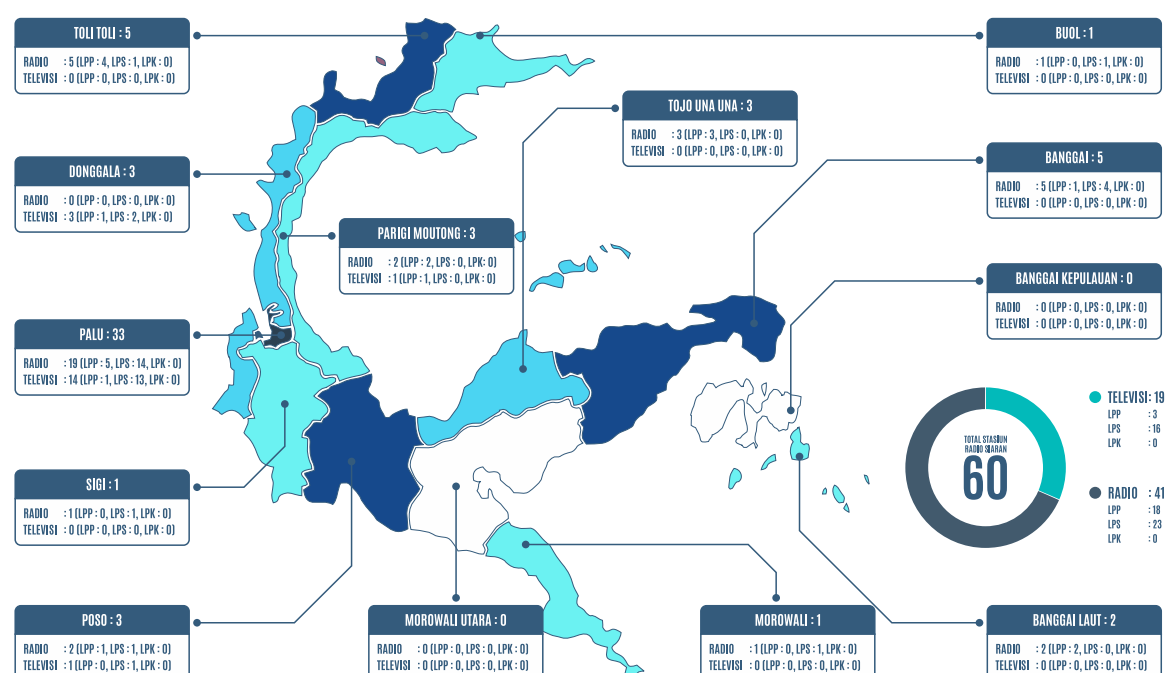
Persentase nilai keberhasilan pencapaian target Perjanjian Kinerja untuk identifikasi ISR *Broadcast* adalah sebesar **257%** dari target yang ditetapkan sebesar 35%.

Target kinerja yang ditetapkan tahun 2020 untuk stasiun radio penyiaran (Radio FM, Radio AM, dan TV UHF) adalah 35% dari jumlah ISR. Jumlah ISR penyiaran adalah 60 (enam puluh), yang terdiri dari 39 Stasiun Radio Siaran FM, 2 Stasiun Radio Siaran AM, dan 19 Stasiun TV Siaran.

Tabel 3.6. Rekapitulasi Pengukuran Broadcast di Wilayah Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Data ISR		Realisasi (Terukur)		Capaian (%)	Kinerja (%)
	Radio	Televisi	Radio	Televisi		
	60		54			
Banggai	5	0	5	0	8.3	23.8
Banggai Kepulauan	0	0	0	0	0	0
Banggai Laut	2	0	1	0	1.7	4.8
Buol	1	0	1	0	1.7	4.8
Donggala	0	3	0	3	5	14.3
Palu	19	14	18	14	53.3	152.4
Morowali	1	0	0	0	0	0
Parigi Moutong	2	1	2	0	3.3	9.5
Poso	2	1	2	1	5	14.3
Tojo Una Una	3	0	1	0	1.7	4.8
Sigi	1	0	1	0	1.7	4.8
Toli Toli	5	0	5	0	8.3	23.8
Total	41	19	36	18	90	257

Gambar 3.1. Sebaran Broadcast di Sulawesi Tengah



Terhadap data ISR untuk radio siaran sebanyak 41 ISR telah dilakukan pengukuran kualitas pancaran dan *bandwidth* sebanyak 36 stasiun radio siaran FM/AM, dimana 5 ISR tidak terukur yaitu 4 ISR milik RRI dengan lokasi Kab. Banggai Laut 1 ISR, Kota Palu 1 ISR, dan Kab. Tojo Una Una 2 ISR, serta 1 ISR milik LPS Kab. Morowali. Kemudian dari hasil pengukuran radio siaran diperoleh hasil 2 stasiun radio terjadi ketidaksesuaian pada *bandwidth* yang melebihi ketentuan, 3 stasiun radio yang tidak aktif/*off air*, dan 1 stasiun radio menggunakan frekuensi radio tidak sesuai dengan frekuensi izin stasiun radio. Terhadap stasiun radio yang ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di peringatkan untuk segera melakukan penyesuaian. Data hasil pengukuran stasiun radio siaran FM dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7. Data Stasiun Radio Siaran FM yang Diukur

No	Nama Stasiun Radio	Nama Udara	Frekuensi (MHz)	Wilayah Layanan	Keterangan
1	PT. GALASIKA SUARA INSANI	GALASIKA FM	93.6	Toili	
2	DIREKTORAT RADIO/ RRI (47/ST. TRANS. TVRI LUWUK)	RRI	99.2	Banggai	
3	PT. RADIO SABUA KARIN	BLASMAONE FM	92.5	Banggai	
4	PT. RADIO SUARA ANDIKA SAKTI	ANDIKA FM	91.7	Banggai	
5	PT. SWARA BAHANA MUTIARA LUWUK	SBM FM	90.9	Banggai	
6	LEMBAGA PENSIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO PEMERINTAH DAERAH BENGAWI KAB. BANGGAI LAUT	RADIO BANGGAWI FM	94.4	Banggai Laut	
7	PT. RADIO ARIES PERSADA	RADIO ARIES	97.3	Buol	
8	DIREKTORAT RADIO/ RRI	RRI PRO 1	90.8	Kota Palu	
9	DIREKTORAT RADIO/ RRI	RRI PRO 2	105	Kota Palu	
10	DIREKTORAT RADIO/ RRI	RRI PRO 3	92.4	Kota Palu	
11	DIREKTORAT RADIO/ RRI	RRI PRO 4	97.5	Kota Palu	
12	PT. RADIO BERLIAN SELARAS TIARA	RADIO RODJA BEST FM	101.8	Kota Palu	
13	PT. RADIO CINTA MANDIRI INDONESIA	RADIO CINTA FM	95.1	Kota Palu	Off Air
14	PT. RADIO GEMA ANGKASA SWARA AL KHAIRAAT PALU	RAL	95.9	Kota Palu	
15	PT. RADIO INSANIA PALU	RADIO INSANIA SULAWESI TENGAH	103.4	Kota Palu	
16	PT. RADIO MASTURA SWARA ABADI	MS FM	98.3	Kota Palu	
17	PT. RADIO NEBULA NADA	NEBULA FM	101	Kota Palu	
18	PT. RADIO NUANSA KASIH PROSKUNEO	RADIO PROSKUNEO FM	105.8	Kota Palu	
19	PT. RADIO SKIP CONNEXIM	RADIO SKIP FM	94.3	Kota Palu	
20	PT. RADIO SUARA SEMBILAN BINTANG	RADIO NEW NINE FM	104.2	Kota Palu	
21	PT. RADIO SWARA NUGRAHA PERDANA	RADIO SWARA NUGRAHA PERDANA	102.6	Kota Palu	
22	PT. RADIO SWARA RAMAYANA JELITA ((ST1038970)	RAMAYANA	87.6	Kota Palu	
23	PT. SUARA BALA KESELAMATAN	CAKRAWALA FM	89.2	Kota Palu	
24	PT. SWARA CITRA KHATULISTIWA	B FM	90	Kota Palu	



25	PT. SWARA RUMAH HATI	RH FM	88.4	Kota Palu	
26	Direktorat Radio/RRI	RRI	97.1	Parigi Moutong	Frekuensi ISR = 99.5 MHz
27	DIREKTORAT RADIO/RRI	RRI SANTIGI	88	Parigi Moutong	Off Air
28	PT. RADIO EKSAL VINO POSO	SKYLINE FM	87.9	Poso	
29	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN POSO	LPPL KAB.POSO	94.6	Poso	
30	DIREKTORAT RADIO/ RRI	SP RRI AMPANA	93	Ampana Kota	
31	PT. RADIO SUARA DAMAI	SUARA DAMAI	93.6	Sigi Biromaru	
32	PT. RADIO MAHARDIKA TOLITOLI	RADIO MAHARDIKA	100.1	Baolan	Off Air
33	DIREKTORAT RADIO/ RRI (98/ST. RRI TOLI TOLI)	PRO 2 TOLITOLI	96.9	Toli Toli	
34	DIREKTORAT RADIO/ RRI (LPP RRI TOLI TOLI)	PRO 3 TOLITOLI	90.2	Toli Toli	
35	DIREKTORAT RADIO/ RRI (LPP RRI TOLI-TOLI)	PRO 1 TOLITOLI	102	Toli Toli	
36	DIREKTORAT RADIO/ RRI	RRI PRO 1 AM TOLITOLI	1.377	Toli Toli	

Terdapat 2 (dua) stasiun radio siaran AM di Sulawesi Tengah, pada tahun 2020 ini hanya 1 (satu) stasiun yang dapat diukur yaitu stasiun radio siaran AM RRI Toli Toli. Tabel 3.8 memperlihatkan hasil pengukuran stasiun radio siaran AM di kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tengah. Hasil pengukuran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04 tahun 2014 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran *Amplitudo Modulation* (AM) pada *Medium Frequency* (MF) Pita Frekuensi Radio 535 kHz - 1605.5 kHz.

Tabel 3.8. Hasil Pengukuran Stasiun Radio Siaran AM di Wilayah Sulawesi Tengah

No	Nama Stasiun Radio	Nama Udara	Frekuensi (MHz)	Wilayah Layanan	Keterangan
1	Direktorat Radio/ RRI (LPP RRI Toli Toli)	Pro 1 AM Toli Toli	1.377	Sulawesi Tengah	
2	Direktorat Radio/ RRI (LPP RRI Palu)	Pro 1 AM Palu	1.035	Sulawesi Tengah	Belum diukur

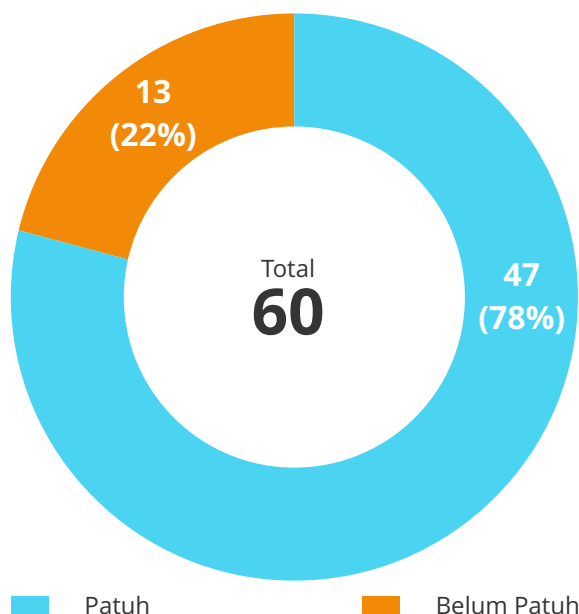
Data ISR untuk televisi siaran sebanyak 19 ISR, 1 ISR tidak terukur adalah televisi siaran milik Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di Kab. Parigi Moutong karena dalam kondisi *Off Air*. Data Hasil pengukuran televisi siaran di wilayah Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini.

Tabel 3.9. Data Hasil Pengukuran Stasiun TV Siaran di Wilayah Sulawesi Tengah

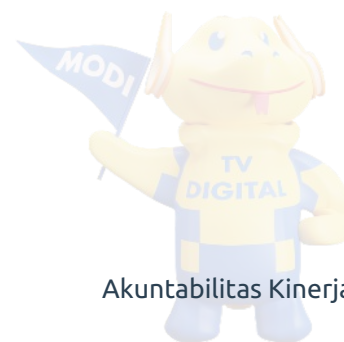
No	Nama Stasiun Radio	Kanal	Frekuensi (MHz)		Nama Udara	Wilayah Layanan	Ket.
			Video	Audio			
1	PT. BANAWA MEDIA KREASINDO	51	711.25	716.75	BTV	BANAWA	Sesuai
2	PT. SULTENG SENEGOR TELEVISI	55	743.25	748.75	SULTENG TV	BANAWA	Sesuai
3	LPP TVRI STASIUN TRANSMISI DONGGALA	32	559.25	564.75	LPP TVRI DONGGALA	BANAWA	Sesuai

4	PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PEMANCAR PALU)	25	503.25	508.75	MNCTV	PALU	Sesuai
5	PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (PALU)	27	519.25	524.75	RCTI	PALU	Sesuai
6	PT. TRANS7 PALU GORONTALO	29	535.25	540.75	TRANS7 PALU	PALU	Sesuai
7	PT. SURYA CITRA TELEVISI (STN RELAY SCTV PALU)	31	551.25	556.75	SCTV	PALU	Sesuai
8	PT. TRANS TV PALANGKARAYA PALU	33	567.25	572.75	TRANS TV PALU	PALU	Sesuai
9	PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI MAKASSAR DAN PALU	37	599.25	604.75	ANTV PALU	PALU	Sesuai
10	LPP TVRI (TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH)	39	615.25	620.75	TVRI SULAWESI TENGAH	PALU	Sesuai
11	PT. GTV PALU	41	631.25	636.75	GLOBAL TV PALU	PALU	Sesuai
12	PT. BAYU PALU PRIMA TV	45	663.25	668.75	INEWS TV	PALU	Sesuai
13	PT. LATIVI MEDIAKARYA LOMBOK & PALU	47	679.25	684.75	TV One PALU	PALU	Sesuai
14	PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA	49	695.25	700.75	METROTV-PALU	PALU	Sesuai
15	PT. MITRA TELEVISI PALU	52	719.25	724.75	NET. PALU	PALU	Sesuai
16	PT. RAJAWALI TELEVISI PALU	54	735.25	740.75	RTV	PALU	Sesuai
17	PT. WASKITA WICAKSANA VISUAL	22	479.25	479.25	PELANGI TV	POSO	Sesuai
18	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	-	562	-	TVRI PARIGI	PARIGI MOUTONG	OFF Air

Grafik 3.5. Persentase Tingkat Kepatuhan Penggunaan ISR Broadcast



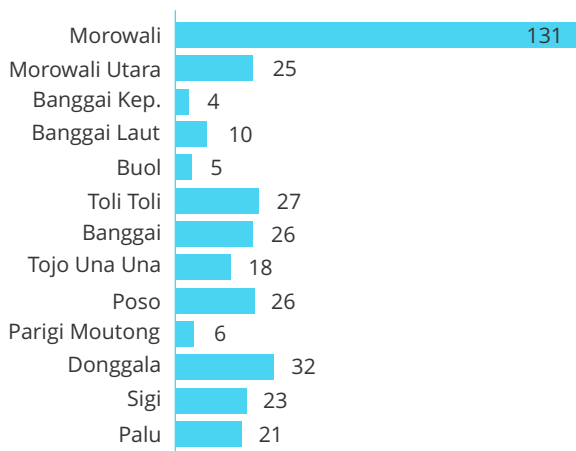
Dari kegiatan pengukuran terhadap 60 stasiun radio *broadcast* diperoleh tingkat kepatuhan 78 % atau 47 stasiun radio dan 22 % atau 13 stasiun radio yang belum sesuai dengan ketentuan antara lain, tidak melakukan pancaran atau lebar *band* frekuensi pancarnya yang melebar. Para penyelenggara stasiun radio tersebut diingatkan untuk segera melakukan pembenahan teknis pancarannya.



3. IK-3 Persentase (%) Jumlah ISR Termonitor

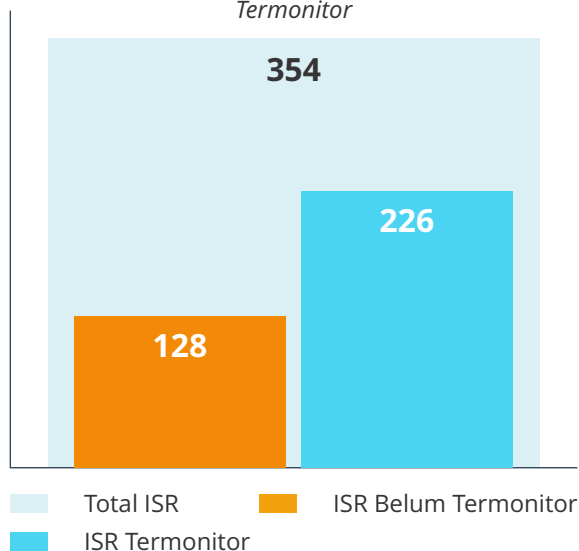
Jumlah ISR pada tahun 2020 yang menjadi target harus termonitor adalah 354 ISR (*Land Mobile Private*) dan tersebar diseluruh wilayah Sulawesi Tengah, jumlah target tiap kabupaten/kota dapat dilihat diagram 3.6. Komunikasi radio untuk *service* ini dikhususkan untuk komunikasi di darat dan digunakan oleh Perusahaan Swasta, BUMN, Instansi Pemerintah, dan Yayasan. Jenis stasiun radio yang dapat digunakan adalah stasiun bergerak atau stasiun tetap, dengan jenis perangkat bisa berupa *Handy Talkie*, *Rig*, maupun *Repeater*.

Grafik 3.6. Data Target ISR Termonitor di Wilayah Sulawesi Tengah



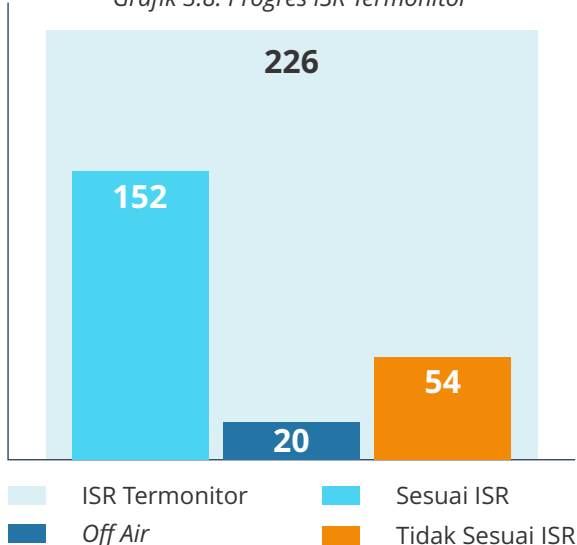
Dengan berbagai keterbatasan baik dari sisi alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, letak/lokasi pengguna stasiun radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu berhasil memonitor dan mengidentifikasi sebanyak 226 ISR, sedangkan yang belum berhasil termonitor sebanyak 128 ISR.

Grafik 3.7. Data ISR (*Land Mobile Private*) Termonitor



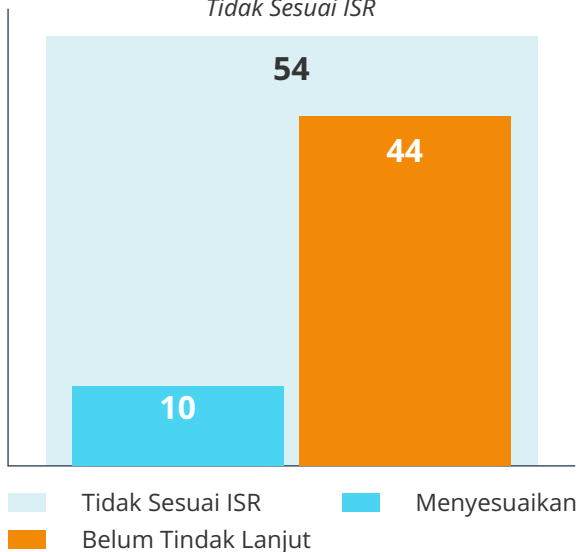
Dari jumlah 226 ISR yang berhasil termonitor, 152 ISR sudah sesuai penggunaannya baik dari sisi lokasi penempatan stasiun radio maupun penggunaan frekuensi radionya, namun masih ditemukan juga penggunaan yang tidak sesuai sebanyak 54 ISR, dan 20 ISR sudah tidak digunakan lagi (*off air*) lihat diagram 3.8. Terhadap temuan yang tidak sesuai ini pihak Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu mengambil langkah persuasif dalam *law enforcement*, dimana dilakukan peringatan langsung dan tertulis.

Grafik 3.8. Progres ISR Termonitor



Dari langkah persuasif ini sebanyak 10 Stasiun radio telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian ISR, 44 ISR yang belum melakukan konfirmasi atau belum ditindaklanjuti dan akan menjadi target operasi penertiban pada kegiatan berikutnya. Grafik 3.9 menunjukkan progres tindak lanjut tidak sesuai ISR.

Grafik 3.9. Progres Tindak Lanjut Temuan Tidak Sesuai ISR



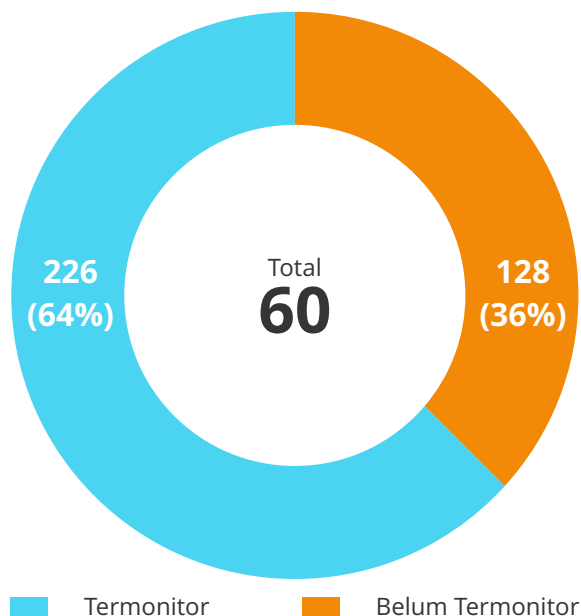
Sesuai dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2020 yaitu 60 % dari jumlah target harus termonitor. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu menargetkan 354 ISR (*Land Mobile Private*) harus termonitor di tahun 2020, akan tetapi dengan berbagai kendala teknis ditambah dengan kondisi penyebaran virus Covid - 19 yang melanda bangsa ini, sehingga target monitoring 354 ISR tidak terpenuhi, namun target kinerja terpenuhi dengan berhasil memonitor sebanyak 226 ISR atau **64%** dari target kinerja.

Pada grafik 3.10 memperlihatkan persentase ISR pada layanan *Land Mobile Private* yang termonitor. Kabupaten Morowali merupakan daerah yang paling sedikit termonitor, ini karena pengguna ISR yang tidak termonitor tersebut pada umumnya merupakan frekuensi yang digunakan untuk mengontrol alat berat di perusahaan tambang yang ada di wilayah ini, salah satu perusahaan yang banyak menggunakan ISR tersebut adalah PT. Imani Prima. Perusahaan yang menggunakan jasa sewa alat berat perusahaan ini, tidak mengetahui terkait penggunaan frekuensi tersebut, sementara untuk konfirmasi langsung ke perusahaan pemilik ISR (PT. Imani Prima), menemui kesulitan karena kantor perusahaan tidak ditemukannya di lapangan.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja IK-3

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase (%)			
Jumlah ISR Termonitor	60	64	106

Grafik 3.10. Persentase ISR Termonitor



Tabel 3.11. Data Rincian ISR Termonitor

Kabupaten/ Kota	Data ISR	ISR Belum Termonitor	ISR Termonitor	Sesuai ISR	ISR Off Air	Tidak Sesuai ISR	Tindak Lanjut		ISR Termonitor (%)
							Sesuai	Belum TL	
Palu	21	4	17	6	0	11	10	1	81%
Sigi	23	0	23	23	0	0	0	0	100%
Donggala	32	0	32	32	0	0	0	0	100%
Parigi Moutong	6	0	6	4	0	2	0	2	100%
Poso	26	4	22	14	0	8	0	8	85%
Tojo Una Una	18	0	18	17	0	1	0	1	100%
Banggai	26	0	26	4	10	12	0	12	100%
Toli Toli	27	0	27	25	0	2	0	2	100%
Buol	5	0	5	5	0	0	0	0	100%
Banggai Laut	10	0	10	5	0	5	0	5	100%
Banggai Kepulauan	4	0	4	0	0	4	0	4	100%
Morowali Utara	25	0	25	6	10	9	0	9	100%
Morowali	131	120	11	11	0	0	0	0	8%
Total	354	128	226	152	20	54	10	44	64%

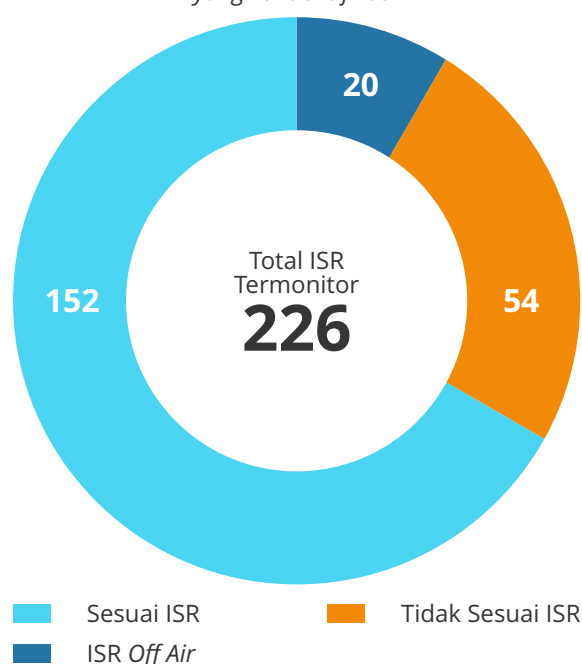
4. IK-4 Persentase (%) Hasil Monitoring Frekuensi yang Teridentifikasi

Target perjanjian Kinerja terhadap hasil monitoring yang harus teridentifikasi adalah 90 %. Sesuai hasil monitoring ISR yang dilaksanakan terdapat 226 ISR yang termonitor dan semuanya teridentifikasi dengan rincian, sesuai 152 ISR, *off air* 20 ISR, dan tidak sesuai 54 ISR, sehingga diperoleh persentase Capaian Kinerja sebesar **100%**. Data Izin Stasiun Radio hasil monitoring yang teridentifikasi per kabupaten/kota dapat dilihat pada diagram 3.11 dan tabel 3.12.

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja IK-4

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase % hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90	100	111.11

Grafik 3.11. Persentase Data ISR Termonitor yang Teridentifikasi



Tabel 3.13. Data ISR Termonitor dan Teridentifikasi

Kabupaten/ Kota	Data ISR	ISR Belum Termonitor	ISR Termonitor	ISR Teridentifikasi	ISR Termonitor dan Teridentifikasi (%)
Palu	21	4	17	17	100
Sigi	23	0	23	23	100
Donggala	32	0	32	32	100
Parigi Moutong	6	0	6	6	100
Poso	26	4	22	22	100
Tojo Una Una	18	0	18	18	100
Banggai	26	0	26	26	100
Toli Toli	27	0	27	27	100
Buol	5	0	5	5	100
Banggai Laut	10	0	10	10	100
Banggai Kepulauan	4	0	4	4	100
Morowali Utara	25	0	25	25	100
Morowali	131	120	11	11	100
Total	354	128	226	226	100

5. IK-5 Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

Untuk tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu memiliki sasaran kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur sebesar 83 %. Tujuan sasaran kinerja ini untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat monitor/ukur dapat berfungsi dengan baik dan terawat.

Perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur terbagi atas 2 (dua) jenis perangkat, yaitu perangkat utama dan perangkat pendukung untuk melakukan kegiatan monitoring, pengukuran, dan pencarian spektrum frekuensi radio. Secara kesisteman, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu memiliki 3 (tiga) macam perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur, yaitu perangkat sistem monitoring dan pencarian spektrum frekuensi radio bergerak, perangkat sistem monitoring spektrum frekuensi radio *transportable*, dan perangkat monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio *portable*.

Balai Monitor SFR Kelas II Palu melakukan perbaikan dan pemeliharaan untuk 3 (tiga) buah alat ukur *spectrum analyzer* (SPA) melalui pihak ketiga yaitu CV. Sarana Mukti pada bulan November 2020. Alat ukur atau *spectrum analyzer* yang dilakukan perbaikan dan pemeliharaan adalah Anritsu MS 2725C, Anritsu MS 2726C dan Anritsu MS 2720T. Pada Anritsu MS 2725C, MS 2726C dan MS 2720T dilakukan perbaikan catu daya baterai 11.1 V 7800 mAh Lithium ion, pengecekan sistem *backup memory* dan pengecekan *control span*. Khusus untuk Anritsu MS2720T dilakukan juga pengecekan *band pass filter*.

Kegiatan inspeksi pemeliharaan perangkat SMFR *transportable* dilakukan sebanyak 6 kali kegiatan untuk di Kab. Poso dan Kab. Banggai, 4 kali kegiatan untuk Kabupaten Poso dan 2 kali kegiatan Kabupaten Luwuk. Kegiatan inspeksi pemeliharaan perangkat SMFR *transportable* yang direncanakan

Balai Monitor SFR Kelas II Palu untuk tahun 2020 adalah 6 kali kegiatan inspeksi pemeliharaan perangkat SMFR *transportable* di Kab. Poso dan Kab. Banggai. Kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR *transportable* yang dilakukan selama tahun 2020 adalah pemeliharaan rutin seperti membersihkan dan memeriksa kondisi perangkat SMFR *transportable*, pergantian baterai *Uninterruptible Power Supply* (UPS), pergantian kabel *Local Area Network* (LAN) yang terputus dan penggantian kamera CCTV.

Sampai dengan Desember 2020, Balai Monitor SFR Kelas II Palu telah melakukan pemeliharaan perangkat SMFR sebanyak 16 perangkat utama dan 109 perangkat pendukung.

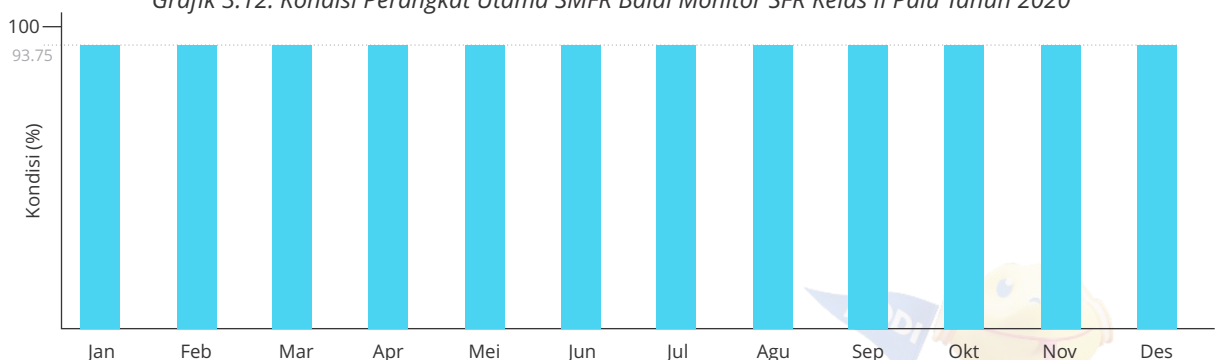
Service Level Agreement (SLA) seluruh perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di Balai Monitor SFR Kelas II Palu untuk tahun 2020 adalah **89.96 %**.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Palu Tahun 2020, persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring /ukur di UPT di tetapkan target kinerjanya adalah 83 %. Sementara persentase rata-rata berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di Balai Monitor SFR Kelas II Palu Tahun 2020 adalah sebesar 89,96 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja IK-5

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83	86.96	108.39

Grafik 3.12. Kondisi Perangkat Utama SMFR Balai Monitor SFR Kelas II Palu Tahun 2020





Gambar 3.2. Pengecekan Site Transportable Kabupaten Poso

6. IK-6 Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR (*Transportable*) Dengan Target 1 Laporan/Bulan

Stasiun monitoring frekuensi radio jenis *transportable* di Wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Palu terdapat 2 (dua) Stasiun yaitu di Kab. Poso dan Kab. Banggai. Target kinerja yang telah ditetapkan Pada tahun 2020 untuk monitoring frekuensi radio dari perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) *transportable* sebesar 1 laporan perbulan atau 12 laporan selama setahun.

Selama tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melakukan monitoring frekuensi radio dari stasiun monitoring frekuensi radio *transportable* Kab. Banggai dan Kab. Poso. Hasil kegiatan monitoring yang telah dilaksanakan telah terealisasi 12 laporan dimana target yang telah ditetapkan adalah sebesar 12 laporan. Sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%**. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja IK-6

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio Dari Setiap Stasiun SMFR (<i>transportable</i>)	12	12	100

7. IK-7 Persentase (%) Penanganan Gangguan Frekuensi Radio untuk Keselamatan Penerbangan dan Maritim

Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan pertahanan negara, keselamatan umum, penyiaran, industri, penerbangan, maritim, navigasi, dan komunikasi individual yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mengingat sifat dan karakteristik spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dan dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah sehingga alokasi penggunaan spektrum radio diatur harus sesuai peruntukannya, tidak saling mengganggu, dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional.

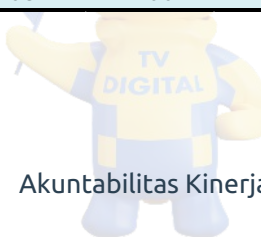
Selama tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah menerima 4 (empat) pengaduan gangguan penggunaan frekuensi radio pada beberapa *subservice* layanan penggunaan frekuensi radio. Penyebab utama gangguan frekuensi adalah pengguna ilegal yang menggunakan frekuensi yang sama dengan pengguna yang berizin, sehingga menyebabkan interferensi. Balai Monitor setelah mendapatkan pengaduan gangguan tersebut kemudian membentuk tim untuk melakukan penanganan gangguan, dari keempat pengaduan gangguan tersebut semuanya dapat diselesaikan dengan baik.

Tabel 3.16. Jenis Gangguan Frekuensi Radio Tahun 2020

No	Nama Pengadu	Tanggal Pengaduan	Tanggal Penanganan	Service	Jenis Gangguan	Stasiun Radio Pengganggu	Hasil Penanganan
1	PT. Ang and Fang Brother	24 Februari 2020	25 – 29 Februari 2020	Bergerak Darat	Gangguan (<i>interference</i>) pada frekuensi 155.550 MHz di mana terdapat mantan karwawan yang masih memegang perangkat radio HT sehingga komunikasi perusahaan terganggu	Penggunaan radio HT oleh mantan karyawan PT Ang and Fang Brother	Gangguan sudah terselesaikan (<i>clear</i>)
2	Radio Swara Citra Khatulistiwa (BFM)	11 Juni 2020	15 - 19 Juni 2020	Radio Siaran FM	Penerimaan siaran radio yang terganggu karena terdengarnya audio dari audio Radio RRI Pro 1 di frekuensi radio 90 MHz milik BFM	RRI Pro 1 (sumber gangguan dari perangkat pemancar milik RRI Pro 1 yang disebabkan oleh penggunaan daya yang besar yang melebihi ketentuan dalam ISR)	Gangguan sudah terselesaikan (<i>clear</i>)
3	PT. PLN Cabang Donggala	22 Juni 2020	24 - 28 Juni 2020	Bergerak Darat	Gangguan (<i>interference</i>) di frekuensi 165.975 MHz	Sumber gangguan berasal dari penggunaan kanal frekuensi radio yang terbalik oleh PLN sendiri sehingga menimbulkan interferensi internal antar <i>link repeater</i> -nya.	Gangguan sudah terselesaikan (<i>clear</i>)
4	PT. Bosowa Tambang Indonesia	20 Juli 2020	21 - 25 Juli 2020	Bergerak Darat	Gangguan penerimaan komunikasi yang kurang baik pada frekuensi 150.025 MHz	Sumber gangguan berasal dari perangkat pengguna yang memiliki penerimaan atau sensitifitas yang kurang baik hal ini diakibatkan penggunaan perangkat yang tidak sesuai ISR	Gangguan sudah terselesaikan (<i>clear</i>)

Tabel 3.17. Presentase Penyelesaian Aduan/Klaim Gangguan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Bulan	Capaian (%)	
			2019	2020
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	Januari	100	100
		Februari	100	100
		Maret	100	100
		April	100	100
		Mei	100	100
		Juni	100	100
		Juli	100	100
		Agustus	100	100
		September	100	100
		Oktober	100	100
		Nopember	100	100
		Desember	100	100



Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja IK-7

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase (%) penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	100	100	100

Selain melaksanakan penanganan gangguan, Seksi Sarana dan Pelayanan juga melakukan konsultasi masyarakat untuk perizinan, selama tahun 2020 loket pelayanan Balai Monitor SFR Kelas II Palu menerima konsultasi dan asistensi sebanyak 148 kali dan laporan pengaduan gangguan sebanyak 4 kali. Daftar per bulan konsultasi masyarakat dan penerimaan aduan gangguan per bulannya sebagai berikut:

Tabel 3.19. Data Pengaduan/Konsultasi

No	Bulan	Keperluan	
		Pengaduan	Konsultasi dan Asistensi
1	Januari	-	15
2	Februari	1	23
3	Maret	-	10
4	April	-	8
5	Mei	-	11
6	Juni	2	10
7	Juli	1	10
8	Agustus	-	17
9	September	-	32
10	Oktober	-	5
11	November	-	7
12	Desember	-	-
Total		4	148

Dari total konsultasi dan asistensi selama tahun 2020, masyarakat paling banyak melakukan konsultasi pengurusan ISR. Petugas pelayanan perizinan dengan baik membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan ISR. Jika berkas dari masyarakat lengkap maka proses pengurusan ISR hanya 1-2 hari saja yang meliputi asistensi pembuatan akun *e-licensing* dan penginputan data teknis stasiun radio ke aplikasi perizinan.

Berdasarkan Data SIMS per Desember 2020 jumlah pengajuan Izin Stasiun Radio (ISR) baru untuk beberapa *service* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.20. Pengajuan ISR Baru Tahun 2020

No	Service	Jumlah ISR Baru
1	Broadcast	9
2	Land Mobile Private	319
3	Land Mobile Public	815
4	Satellite	2
5	Fixed	1222
Total		2367

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sepanjang tahun 2020 jumlah pengurusan ISR terbanyak berada pada *fixed service* kemudian disusul *land mobile public*, *land mobile private*, *broadcast* dan *satellite*. Untuk layanan *broadcast* sebanyak 9 (sembilan) ISR merupakan lembaga penyiaran lama yang melakukan pengajuan ISR baru sebanyak 8 (delapan) ISR karena izinnya telah berumur 10 tahun dan 1 (satu) lembaga penyiaran baru.

Tabel 3.21. Pengajuan ISR Baru Broadcast Tahun 2020

No	Pengguna	Jumlah ISR
1	Direktorat Radio/RRI	3
2	PT. Radio Tepe Asa Aroa FM	1
3	PT. Radio Nebula Nada	1
4	PT. Radio Swara Nugraha Perdana	1
5	PT. RCTI Tigabelas	1
6	PT. Surya Citra Kreasitama	1
7	PT. TPI Delapan	1
Total		9

8. IK-8 Persentase (%) Penertiban Frekuensi Radio

Tujuan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio adalah untuk memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sudah tertib dan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna frekuensi yang lain.

Dengan karakteristik unik dan aturan penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut, kegiatan pengawasan dan pengendalian oleh Balai Monitor SFR Kelas II Palu senantiasa dilakukan. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan mengamati, memantau, memeriksa, mengukur, menilai, dan menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai ketentuan.

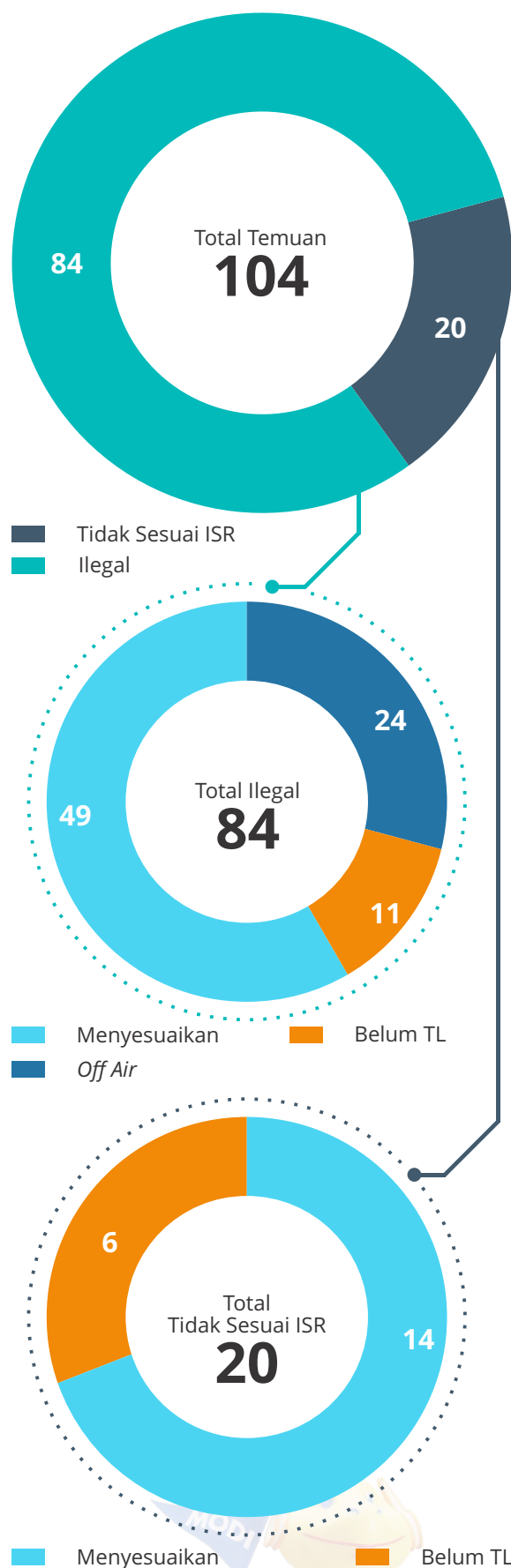
Target kinerja untuk tindak lanjut atas penggunaan frekuensi ilegal sebesar 50 %. Pada akhir tahun 2020 dengan segala potensi yang ada, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu memaksimalkan upaya tindak lanjut temuan penggunaan frekuensi ilegal sehingga dapat terealisasi sebesar 83.65 % dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 50 %. Sehingga realisasi capaian adalah **167 %**.

Tabel 3.22. Hasil Temuan dan Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal/Tidak Sesuai ISR

Hasil Temuan	Status				
	Ilegal			Tidak Sesuai ISR	
	84			20	
104	Off Air	Urus Izin	Belum Ada Konf.	Sesuai ISR	Belum Ada Konf.
	24	49	11	14	6

Dari grafik 3.13 di samping dapat diketahui persentase keberhasilan penertiban dan tindak lanjut tahun 2020 adalah sebesar 83,65 %, bila target kinerja yang ditetapkan 50 % maka tingkat keberhasilan kinerja adalah **167 %**.

Grafik 3.13. Progres Penertiban dan Tindak Lanjutnya Tahun 2020

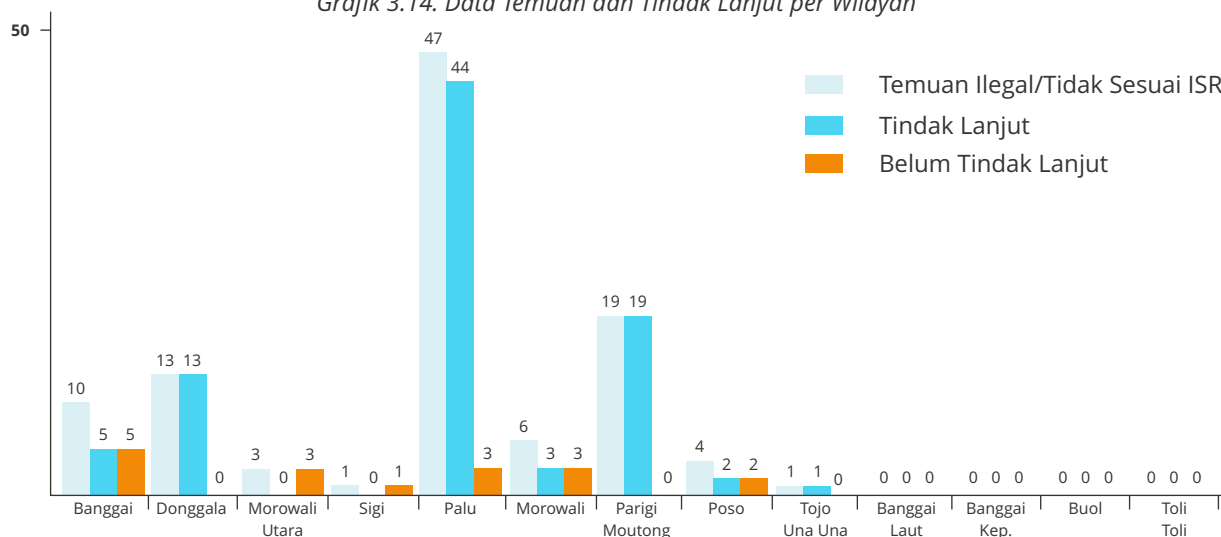


Tabel 3.23. Capaian Indikator Kinerja IK-8

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase (%) penertiban frekuensi radio	50	83.65	167

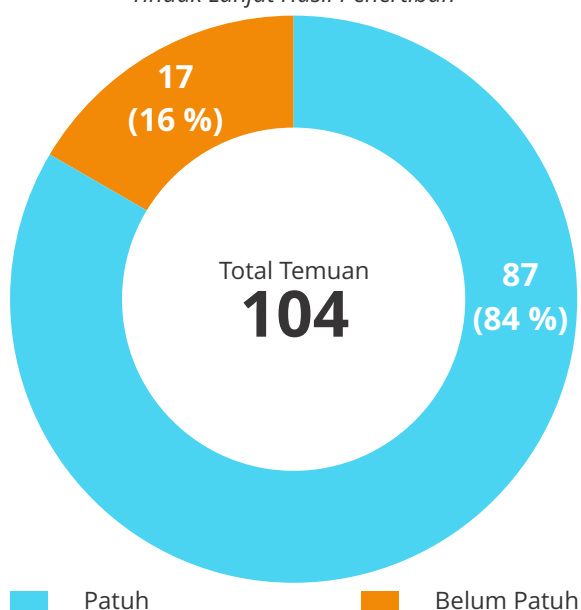
Secara rinci tingkat keberhasilan pelaksanaan penertiban dan tindaklanjutnya terhadap kabupaten/kota di wilayah Sulawesi tengah dapat dilihat pada grafik 3.14.

Grafik 3.14. Data Temuan dan Tindak Lanjut per Wilayah



Dari grafik 3.14 masih terlihat 17 stasiun yang belum ditindaklanjuti terdiri dari 2 stasiun di Kab. Poso, 3 stasiun di Kab. Morowali, 3 stasiun di Kota Palu, 1 stasiun di Kab. Sigi, 3 stasiun di Kab. Morowali Utara dan 5 stasiun di Kab. Banggai. Pada umumnya sudah diberi surat peringatan namun pihak Balai Monitor SFR Kelas II Palu belum mendapat tanggapan balik terkait peringatan tersebut. Sementara pada tahun 2020 fokus kegiatan penertiban dilakukan di Kota Palu dan Kab. Donggala. Adapun data yang tidak ditindaklanjuti di Kota Palu 3 stasiun merupakan data radio yang tidak sesuai ISR yang dimiliki, sehingga pada saat kegiatan penertiban tidak dimasukkan dalam target penertiban.

Grafik 3.15. Persentase Kepatuhan Tindak Lanjut Hasil Penertiban



9. IK-9 Persentase (%) Monitoring Perangkat Telekomunikasi

Perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, digunakan, dan atau diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan yang berlaku, dalam hal ini adalah persyaratan adanya sertifikasi perangkat telekomunikasi. Agar peredaran alat dan perangkat telekomunikasi yang ilegal yang ada di Indonesia dapat diminimalisir jumlahnya, serta melihat potensi peredaran alat perangkat telekomunikasi ilegal di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, maka pada kegiatan monitoring juga dilaksanakan inspeksi ke beberapa *outlet* penjualan perangkat telekomunikasi untuk memastikan perangkat telekomunikasi yang diperjualbelikan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Target monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi tahun 2020 adalah 1 (satu) laporan, sementara kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 6 kali, hasil dari semua kegiatan monitoring perangkat tidak ditemukan pelanggaran penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan PM Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan

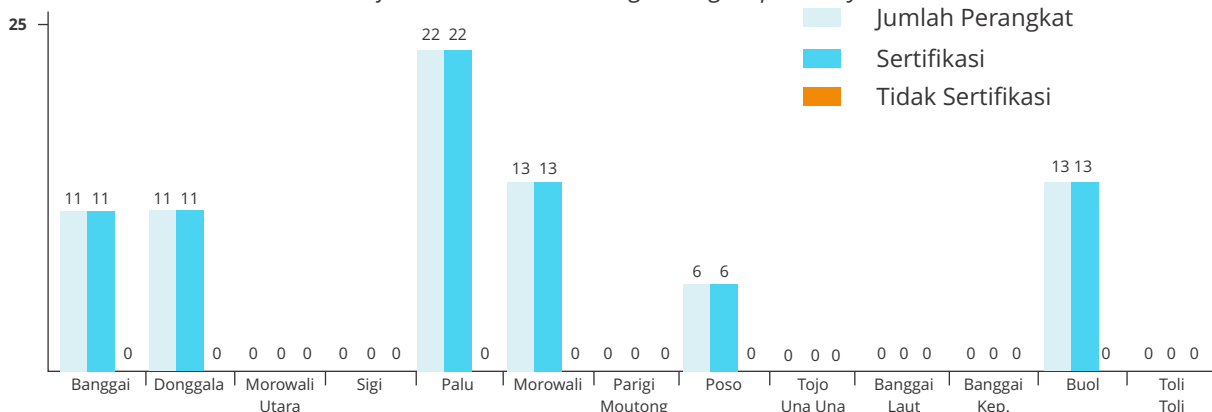
Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Dari monitoring perangkat telekomunikasi yang telah dilaksanakan diperoleh 76 sampel perangkat telekomunikasi dan didominasi oleh telepon seluler/*handphone*. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat akan telepon seluler sangat tinggi. Dari seluruh perangkat yang telah termonitor tidak ditemukan adanya pelanggaran dan seluruh perangkat telekomunikasi tersebut telah bersertifikasi, dengan kata lain tingkat kepatuhan sertifikasi perangkat yang termonitor adalah 100%.

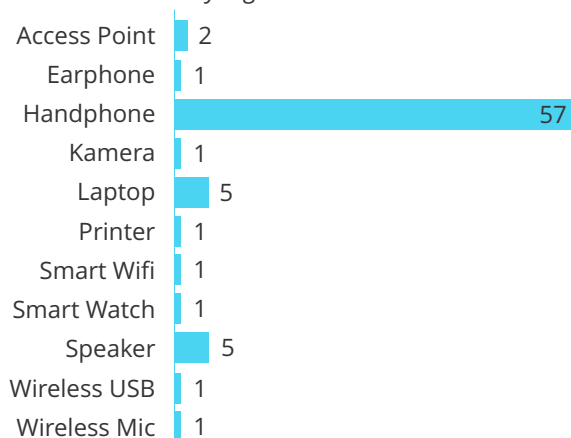
Tabel 3.24. Capaian Indikator Kinerja IK-9

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase (%) Pelaksanaan Monitoring Dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi	1	6	600

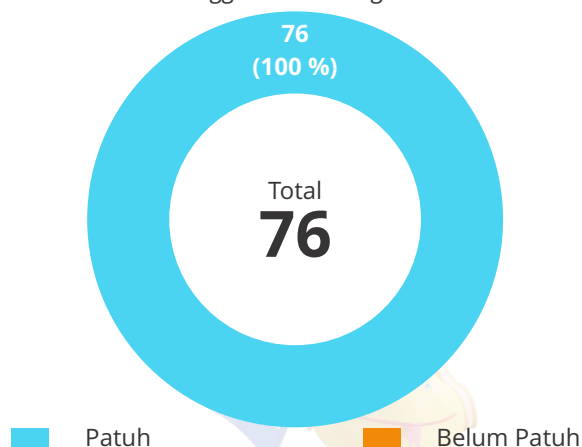
Grafik 3.16. Data Monitoring Perangkat per Wilayah



Grafik 3.17. Data Perangkat yang Termonitor



Grafik 3.18. Persentase Kepatuhan Penggunaan Perangkat



10.IK-10 Persentase (%) Peserta Sosialisasi Memahami Informasi di Bidang SDPPI

Sosialisasi merupakan wadah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait peraturan dan proses perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio legal dan sesuai peruntukannya serta menciptakan penggunaan spektrum frekuensi radio yang legal dan tidak saling mengganggu.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan pada Kamis tanggal 24 September 2020 di Hotel *Best Western* Palu dengan peserta sebanyak 50 orang yang berasal dari instansi pemerintah, swasta, serta masyarakat yang terkait langsung dengan penggunaan spektrum frekuensi radio. Para peserta mendapatkan materi dari Tim Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tentang alokasi spektrum frekuensi radio mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, semua aspek kehidupan tidak terlepas dari penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga penggunaan spektrum frekuensi radio harus diatur oleh pemerintah. Pemateri yang kedua Bapak Irawan dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang memaparkan tentang perizinan berusaha melalui

Online Single Submission (OSS) yang terkait dengan telekomunikasi termasuk izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

Selain bimbingan teknis yang dilaksanakan di Hotel *Best Western* Palu, Bimtek juga dilaksanakan secara *on the spot* ke alamat pengguna frekuensi radio di kota Palu dan Kabupaten Donggala untuk memberikan asistensi terkait penggunaan akun yang mereka miliki dan memastikan pemilik akun dapat mengelola dan memantau sendiri akun yang mereka miliki agar fungsi kontrol terhadap kepatuhan pembayaran SPP BHP frekuensi dapat dilaksanakan secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sasaran program terkait terwujudnya pemenuhan pelayanan publik perizinan SFR dan penanganan BHP frekuensi radio telah melebihi target dan realisasi yang telah direncanakan sebelumnya oleh Ditjen SDPPI sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.25.

Tabel 3.25. Capaian Indikator Kinerja IK-10

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase (%) Peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI	80	90	112.5



Gambar 3.3. Kegiatan Sosialisasi

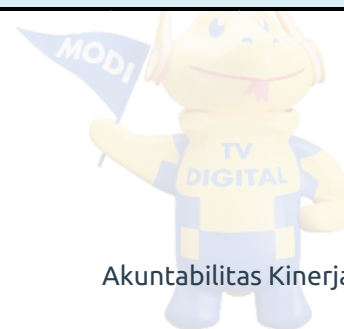
11.IK-11 Persentase (%) Pelaksanaan Sertifikasi Operator Radio Berbasis CAT

Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT di UPT dilaksanakan melalui Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR) yang merupakan rangkaian dari sertifikasi dan uji kompetensi dalam rangka untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR). Setelah mendapatkan ISR barulah para penggiat amatir radio diperkenankan untuk mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai dengan tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku.

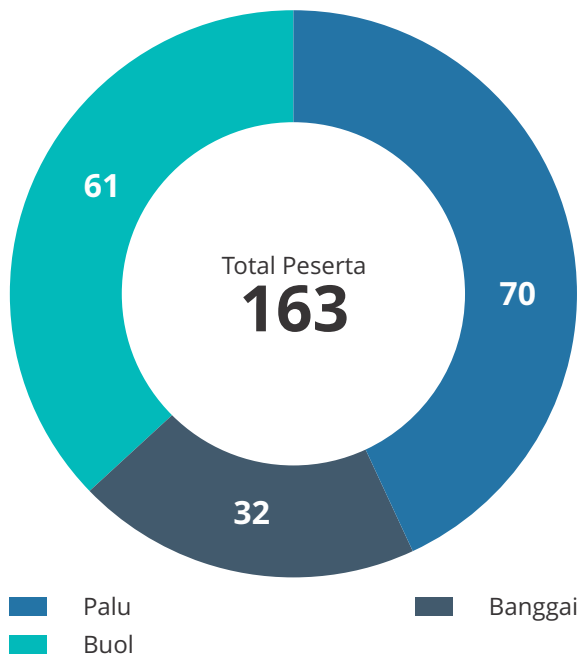
Dalam tahun 2020 diprogramkan pelaksanaan UNAR Non Reguler sebanyak 1 kali dan telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2020 di Kabupaten Buol, dengan jumlah peserta sebanyak 97 orang, dengan persentase kelulusan sebesar 86.60 %. Selain UNAR Non Reguler, Balai Monitor SFR Kelas II Palu juga melaksanakan kegiatan ujian amatir radio berbasis komputer (CAT) UNAR Reguler sebanyak 12 kali di tahun 2020. CAT UNAR Reguler dilaksanakan setiap bulan dengan perincian 11 kali dilakukan di Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palu dan 1 kali dilaksanakan di Kabupaten Banggai.

Tabel 3.26. Daftar Peserta UNAR Tahun 2020

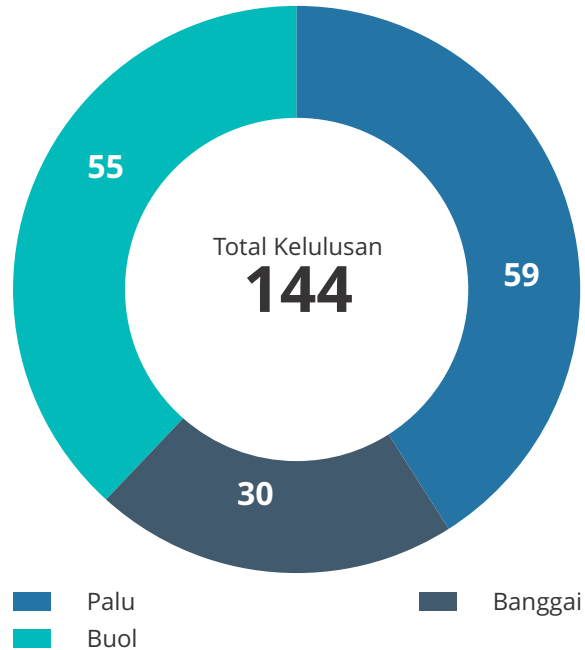
No	Tempat Pelaksanaan	Peserta UNAR						Keterangan
		Jumlah Pendaftar			Jumlah Kelulusan			
		Siaga	Penggalang	Penegak	Siaga	Penggalang	Penegak	
1	Kab. Buol	61	28	8	55	24	5	Non Reguler/ Semi CAT
2	Balmon Palu	2	3	1	2	3	1	Reguler/ Full CAT
3	Balmon Palu	4	0	0	3	0	0	Reguler/ Full CAT
4	Balmon Palu	5	0	0	4	0	0	Reguler/ Full CAT
5	Balmon Palu	0	1	0	0	1	0	Reguler/ Full CAT
6	Balmon Palu	2	1	0	0	1	0	Reguler/ Full CAT
7	Balmon Palu	2	1	1	2	1	1	Reguler/ Full CAT
8	Balmon Palu	5	2	1	3	2	1	Reguler/ Full CAT
9	Balmon Palu	9	1	0	7	1	0	Reguler/ Full CAT
10	Balmon Palu	12	1	0	10	1	0	Reguler/ Full CAT
11	Kab. Banggai	32	17	1	30	16	1	Reguler/ Full CAT
12	Balmon Palu	14	4	0	13	4	0	Reguler/ Full CAT
13	Balmon Palu	15	0	0	15	0	0	Reguler/ Full CAT
Total		163	59	12	144	54	9	



Grafik 3.19. Jumlah Peserta UNAR Tahun 2020



Grafik 3.20. Jumlah Kelulusan UNAR Tahun 2020



Tabel 3.27. Capaian Indikator Kinerja IK-11

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase (%) pelaksanaan Sertifikasi Operator Radio berbasis CAT	100	100	100



Gambar 3.4. Kegiatan UNAR Berbasis CAT

12.IK-12 Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio

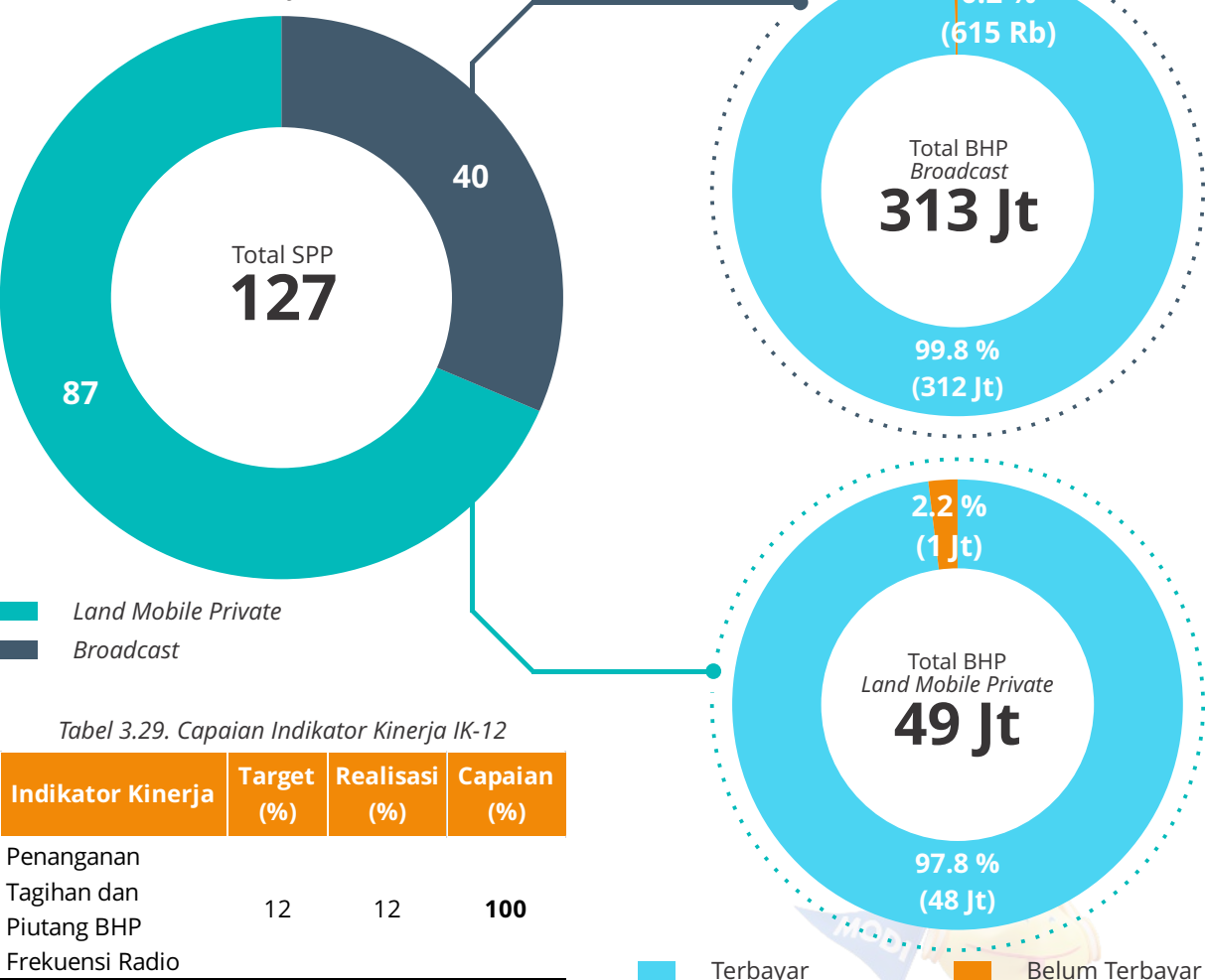
Indikator kinerja penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio memiliki target realisasi sebesar 12 laporan. Dengan telah diterapkannya *e-licensing* dan penerapan tanda tangan digital dalam perizinan spektrum frekuensi radio maka klien/para pengguna frekuensi radio yang sudah memiliki akun *e-licensing* akan menerima SPP BHP frekuensi radio dan ISR melalui *email* sehingga UPT tidak lagi mengirimkan SPP dan salinan ISR kepada mereka, tetapi tetap dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pembayaran SPP dimaksud.

Dalam rangka mengurangi atau mencegah timbulnya piutang BHP frekuensi, petugas Sarana dan Pelayanan menghubungi klien (pihak perusahaan atau instansi pemerintah) melalui telepon maupun mengirimkan tagihan SPP BHP melalui media *whatsapp* untuk mengingatkan batas jatuh tempo pembayaran SPP BHP frekuensi, jika SPP BHP belum dibayar dan telah terbit Surat Peringatan (SP) 1/2/3 dan SP terakhir maka petugas akan mengunjungi klien tersebut ataupun menghubungi via media telepon, *whatsapp*, dan media lainnya untuk menanyakan penyebab keterlambatan pembayaran Surat Peringatan tersebut.

Tabel 3.28. Nilai BHP Frekuensi Radio

No	Service	Jumlah SPP	Jumlah Waba	Nilai BHP (Rp)	Terbayar (Rp)	Belum Terbayar (Rp)
1	Broadcast	40	40	313,517,602	312,902,535	615,067
2	Land Mobile Private	87	87	49,581,670	48,534,148	1,047,522
Jumlah		127	127	363,099,272	361,436,683	1,662,589

Grafik 3.21. BHP Frekuensi Radio Berdasarkan Jumlah SPP



Tabel 3.29. Capaian Indikator Kinerja IK-12

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio	12	12	100

Tabel 3.30. Rekapitulasi Pendistribusian SPP, ST dan ISR

No	Bulan	Jumlah Diterima			Jumlah Terkirim			Capaian (%)
		SPP	Surat Tagihan	ISR	SPP	Surat Tagihan	ISR	
1	Januari	13	1	0	13	1	0	100
2	Februari	6	0	0	6	0	0	100
3	Maret	9	3	0	9	3	0	100
4	April	5	2	0	5	2	0	100
5	Mei	4	3	0	4	3	0	100
6	Juni	5	2	0	5	2	0	100
7	Juli	6	0	0	6	0	0	100
8	Agustus	11	0	0	11	0	0	100
9	September	26	0	0	26	0	0	100
10	Oktober	13	2	0	13	2	0	100
11	November	11	4	0	11	4	0	100
12	Desember	14	6	0	14	6	0	100
Jumlah		123	23	0	123	23	0	100

Tabel 3.31. Rekapitulasi Jumlah SPP Terbayar

No	Bulan	Jumlah SPP Terkirim	Jumlah SPP Terbayar	Persentase SPP Terbayar
1	Januari	13	10	76.92
2	Februari	6	5	83.33
3	Maret	9	6	66.67
4	April	5	5	100
5	Mei	4	4	100
6	Juni	5	5	100
7	Juli	6	6	100
8	Agustus	11	8	72.73
9	September	26	24	92.31
10	Oktober	13	11	84.62
11	November	11	11	100
12	Desember	14	14	100
Jumlah		123	109	89.71



Gambar 3.5. Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi

13.IK-13 Penanganan Piutang yang Telah Dilimpahkan ke KPKNL

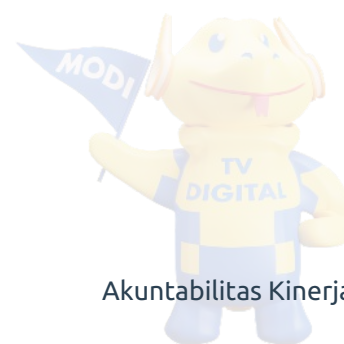
Indikator kinerja jumlah laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL memiliki target sebesar 4 Laporan (1 laporan per triwulan). Setiap pengguna frekuensi radio yang telah memiliki ISR memiliki kewajiban untuk membayar BHP Frekuensi radio setiap tahun. Apabila pengguna frekuensi tersebut tidak melakukan pembayaran BHP frekuensi radio sampai dengan keluarnya surat tagihan IV, maka ISR yang dimiliki akan terkena status *revoke* atau dicabut. Pengakhiran ISR tidak menghapuskan kewajiban pelunasan piutang BHP frekuensi radio. Apabila status ISR dicabut maka piutang BHP frekuensi radio menjadi piutang negara dan akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan RI untuk melakukan penagihan.



Jumlah penyerahan piutang BHP frekuensi sampai tahun 2020 adalah Rp 126.279.965,- jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) aktif sebesar Rp 19.708.723,- yang berasal dari Wajib Bayar Pemda Kabupaten Buol dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemda Kabupaten Toli-Toli. Berdasarkan hasil penanganan pelimpahan piutang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol akan menyampaikan tagihan tersebut ke Pejabat yang terkait di Pemerintah Daerah setempat dan akan segera mengupayakan proses pelunasan piutang dimaksud. Sampai akhir Desember 2020 posisi penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 3.32.



Gambar 3.6. Penanganan Piutang BHP Frekuensi



Tabel 3.32. Data Hasil Pengurusan Penanganan

No	No Klien	Nama Wajib Bayar / Penanggung Hutang	Pelimpahan	Tahap Pengurusan	Jumlah Penyerahan
1	38771	BINA ASTA TUNGGAL, PT	2012	SURAT PSBDT	4,943,590
2	100449	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMDA KABUPATEN TOLITOLI	2012	PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA	2,919,210
3	55281	FAJAR MULIA ABDINUSA, PT	2012	SURAT PSBDT	1,745,227
4	100153	INSAN JAYA, CV	2012	SURAT PSBDT	3,367,472
5	102293	KARYA AGRO LESTARI, PT	2012	SURAT PSBDT	592,196
6	100000	PEMERINTAHAN KABUPATEN BUOL(SULTENG)	2012	PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA	13,436,290
7	6870	RADIO BITTARA INDAH, PT.	2012	SURAT PSBDT	5,441,156
8	6832	RADIO ARIBAWANA SEMESTA PRABASWARA, PT	2012	SURAT PSBDT	12,543,600
9	8027	RADIO SWARA MAGAGA, PT	2012	LUNAS	6,664,408
10	28	TOMINI SAKANA, PT	2012	SURAT LUNAS	209,502
11	15191	RADIO BULAVA RUSPA, PT	2012	SURAT PSBDT	2,312,841
12	8678	DINAS KEHUTANAN DATI.I.SULTENG	2012	SURAT LUNAS	819,996
13	8365	PHINISI PUTRA MANDIRI, PT	2012	SURAT PSBDT	2,039,632
14	8365	PHINISI PUTRA MANDIRI, PT	2016	SURAT PSBDT	2,327,016
15	38771	BINA ASTA TUNGGAL, PT	2016	SURAT PSBDT	6,188,449
16	100449	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMDA KABUPATEN TOLITOLI	2016	PEMBERITAHUAN SP	3,654,297
17	55281	FAJAR MULIA ABDINUSA, PT	2016	SURAT PSBDT	1,529,693
18	100153	INSAN JAYA, CV	2016	SURAT PSBDT	3,454,518
19	102293	KARYA AGRO LESTARI, PT	2016	SURAT PSBDT	1,132,661
20	100000	PEMERINTAHAN KABUPATEN BUOL(SULTENG)	2016	SURAT LUNAS	3,679,802
21	6870	RADIO BITTARA INDAH, PT.	2016	SURAT PSBDT	4,560,858
22	6832	RADIO ARIBAWANA SEMESTA PRABASWARA, PT	2016	SURAT PSBDT	8,892,974
23	8027	RADIO SWARA MAGAGA, PT	2016	SURAT PSBDT	4,606,481
24	28	TOMINI SAKANA, PT	2016	SURAT LUNAS	127,468
25	2421	ARTA PALU, PT	2016	SURAT LUNAS	232,908
26	6637	RADIO SETIA NADA, PT	2016	SURAT PSBDT	4,186,189
27	103738	PT. ASIAMAX MINING INDONESIA	2016	SURAT LUNAS	477,038
28	105490	RADIO SWARA DONGGALA, PT.	2018	SURAT LUNAS	854,004
29	8365	PHINISI PUTRA MANDIRI, PT	2018	SURAT PSBDT	4,366,648
30	8678	DINAS KEHUTANAN DATI.I.SULTENG	2018	SURAT LUNAS	1,423,286
31	47531	YAYASAN MERAH PUTIH	2018	SURAT LUNAS	1,636,755
32	50931	SEKRETARIAT KABUPATEN DONGGALA	2018	SURAT LUNAS	9,585,504
33	103904	WADI AL AINI	2018	SURAT LUNAS	526,573
34	47791	KOLAMTRACO,PT.	2018	SURAT LUNAS	564,585
35	110699	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMKAB TOJO UNA UNA	2018	SURAT LUNAS	237,754
36	110566	PUSAKA JAYA PALU POWER, PT.	2019	SURAT LUNAS	548,614
37	106120	PALU GRAHA SEJAHTERA, PT.	2019	SURAT LUNAS	1,007,753
38	112314	MULTI SARI BANGUN PERSADA, PT.	2019	SURAT LUNAS	329,169
39	109098	MITRA SUARA SEJATI CAB PALU, PT.	2019	SURAT LUNAS	182,871
40	111508	RADIO KOMUNITAS WALI SONGO PALU	2019	SURAT LUNAS	1,233,179
41	103830	PUSAKA JAYA PALU POWER, PT	2019	SURAT LUNAS	512,040
42	109646	SLIKSTONE MITRA STAY, PT.	2019	SURAT LUNAS	401,249
43	101893	CITRA NUANSA ELOK, PT.	2019	SURAT LUNAS	146,297
44	7521	CENTRAL MUTIARA,PT	2019	SURAT LUNAS	638,212
Total					126,279,965

Piutang Negara Oleh KPKNL Palu per 20 Agustus 2020

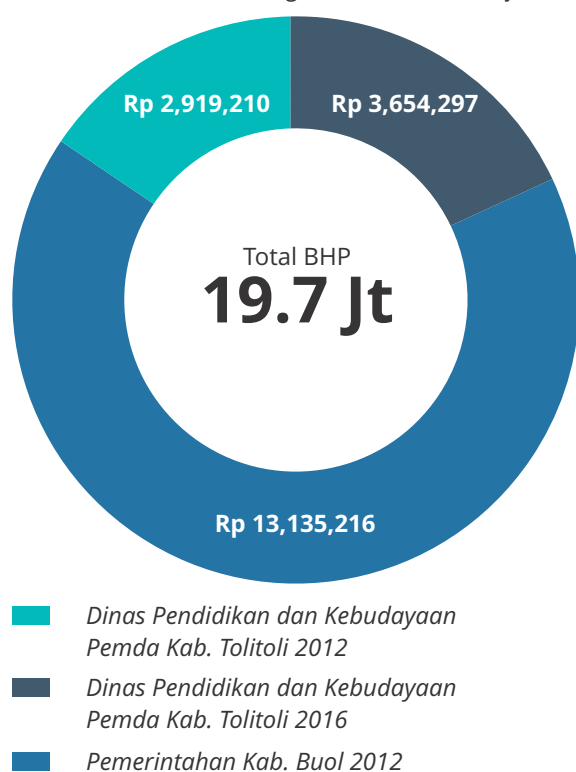
Pengembalian	Koreksi	Total Jumlah Penyerahan	PEMBAYARAN				PSBDT	BKPN Aktif
			Pelunasan (Pbk)	Anggsur	Pelunasan Langsung SDPPI	Ket.		
		4,943,590					4,943,590	0
		2,919,210						2,919,210
		1,745,227					1,745,227	0
		3,367,472					3,367,472	0
		592,196					592,196	0
		13,436,290		301,074		10/3/2017		13,135,216
		5,441,156					5,441,156	0
		12,543,600					12,543,600	0
		6,664,408	6,664,408			6/17/2013		0
		209,502	209,502			28/03/2014		0
		2,312,841					2,312,841	0
		819,996	819,996			20/02/2014		0
		2,039,632					2,039,632	0
		2,327,016					2,327,016	0
		6,188,449					6,188,449	0
		3,654,297						3,654,297
		1,529,693					1,529,693	0
		3,454,518					3,454,518	0
		1,132,661					1,132,661	0
		3,679,802	3,679,802			10/3/2017		0
		4,560,858					4,560,858	0
		8,892,974					8,892,974	0
		4,606,481					4,606,481	0
		127,468	127,468			28/08/2018		0
		232,908	232,908			28/08/2018		0
		4,186,189					4,186,189	0
		477,038	477,038			17/01/2017		0
		854,004	854,004			28/08/2018		0
		4,366,648					4,366,648	0
		1,423,286	1,423,286			25/07/2018		0
		1,636,755	1,636,755			11/7/2018		0
		9,585,504	9,585,504			11/12/2019		0
		526,573	526,573			28/08/2018		0
		564,585	564,585			4/7/2018		0
		237,754	237,754			30/07/2018		0
		548,614	548,614			10/6/2019		0
		1,007,753	1,007,753			10/6/2019		0
		329,169	329,169			10/7/2019		0
		182,871	182,871			10/7/2019		0
		1,233,179	1,233,179			17/10/2019		0
		512,040	512,040			16/08/2019		0
		401,249	401,249			25/09/2019		0
		146,297	146,297			29/10/2019		0
		638,212	638,212			1/11/2019		0
0	0	126,279,965	32,038,967	301,074	0		74,231,201	19,708,723



Tabel 3.33. Rangkuman Data Pengurusan Penanganan Piutang Sampai Dengan Tahun 2020

No	Keterangan	Jumlah Berkas	Jumlah (Rp)
1	Total Penyerahan	44	126,279,965
2	Pengembalian	-	0
3	Koreksi	-	0
4	BKPN yang diterima	44	126,279,965
5	Pelunasan (Pbk)	23	32,038,967
6	Angsuran	-	301,074
7	Lunas Langsung ke SDPPI	-1	0
8	PSBDT	18	74,231,201
9	BKPN Aktif	3	19,708,723

Grafik 3.22. Piutang Negara BHP Frekuensi Radio dengan Status BKPN Aktif



Tabel 3.34. Capaian Indikator Kinerja IK-13

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penanganan Piutang yang Telah Dilimpahkan ke KPKNL	4	4	100

14.IK-14 Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR

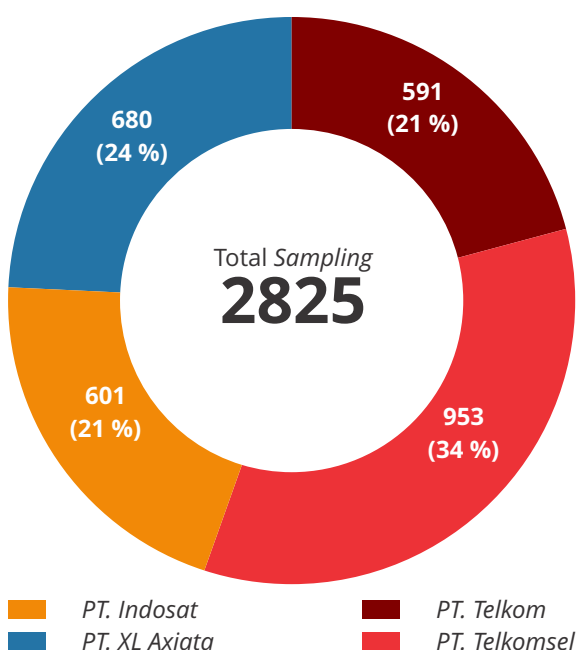
Untuk meningkatkan pelayanan perizinan frekuensi radio dan akurasi data perizinan frekuensi radio pada data base Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), dilaksanakan kegiatan inspeksi stasiun radio sebagai tindak lanjut hasil validasi data ISR yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI terhadap penggunaan frekuensi *microwave link* operator seluler.

Pelaksanaan kegiatan inspeksi stasiun radio tahun 2020 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Operasi Sumber Daya Nomor : 519/DJSDPPI.3/SP.02.10/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Dalam Rangka Validasi Data ISR. Target kinerja yang ditetapkan untuk kegiatan inspeksi ini adalah 85 %.

Jumlah ISR *microwave link* wilayah Sulawesi Tengah hasil validasi data tahun 2020 yang dilakukan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya adalah sebanyak 4034 ISR stasiun radio. Dengan menggunakan metode *sampling*, jumlah data ISR stasiun radio yang menjadi target inspeksi adalah sebesar 2825 stasiun radio yang tersebar di 13 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tengah untuk 4 pengguna yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Telkomsel, PT. Indosat, dan PT. XL Axiata.

Dari hasil pelaksanaan inspeksi 2825 stasiun radio ditemukan sebanyak 1660 (59 %) stasiun radio yang memiliki ISR dan sesuai (legal), sebanyak 273 (10 %) stasiun radio digunakan tidak sesuai

Grafik 3.23. Persentase Sampling ISR per Operator



dengan ISR yang dimiliki, 746 (26 %) ISR tidak ditemukan penggunaannya di lapangan dan sebanyak 146 (5 %) stasiun radio yang belum memiliki ISR (ilegal).

Terhadap temuan hasil inspeksi stasiun radio tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

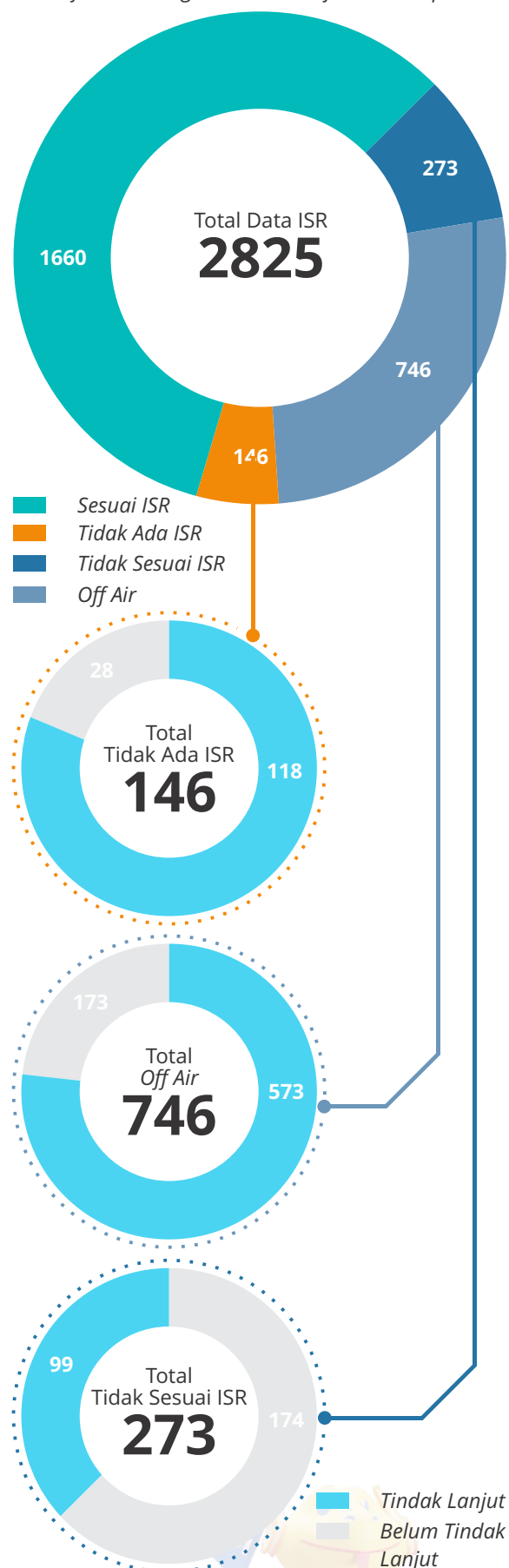
- Stasiun radio yang belum memiliki ISR, diberikan surat peringatan kepada penggunanya untuk tidak menggunakan frekuensi radio tanpa ISR dan diberikan waktu paling lama 7 hari kerja untuk mengajukan permohonan ISR sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.
- Stasiun radio tidak sesuai ISR, diberikan surat peringatan kepada penggunanya untuk mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data ISR kepada Direktur Operasi Sumber Daya atau melakukan perubahan parameter teknis sesuai ISR paling lama 7 hari kerja sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.
- Stasiun radio tidak digunakan, diberikan surat peringatan kepada penggunanya agar mengajukan Surat Permohonan Penghentian Masa Laku ISR kepada Direktur Operasi Sumber Daya paling lama 7 hari kerja sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.

Berdasarkan hasil tindak lanjut data inspeksi terdapat 118 stasiun radio yang tidak memiliki ISR telah mengajukan permohonan dan terbit ISR. Sebanyak 99 stasiun radio yang tidak sesuai ISR telah menyesuaikan dengan ISR atau mengajukan ISR baru, serta sebanyak 573 Stasiun radio yang tidak digunakan telah mengajukan penghentian masa laku ISR. Sehingga secara keseluruhan kondisi akhir hasil inspeksi stasiun radio tahun 2020 adalah sebanyak 2450 stasiun radio legal, 174 Stasiun radio tidak sesuai ISR, 173 ISR tidak digunakan dan 28 stasiun radio belum memiliki ISR. Dengan demikian persentase kesesuaian data hasil inspeksi dengan ISR adalah sebesar 86.73 %, bila disandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 81 %, maka persentase capaian kinerjanya adalah sebesar **107.07 %**.

Tabel 3.35. Capaian Indikator Kinerja IK-14

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	85	86.73	101.18

Grafik 3.24. Progres Tindak Lanjut Hasil Inspeksi



Sasaran 2

Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Yang Bersih, Efisien Dan Efektif

Pelaksanaan atau layanan administrasi yang efektif dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu sehingga tercapai target yang telah direncanakan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dalam melaksanakan layanan administrasi yang sesuai perencanaan terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari:

- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)
- Pengelolaan Anggaran
- Pengelolaan Barang Milik Negara
- Pengelolaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- Pengelolaan Persuratan

a. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

Indikator kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) memiliki target 86 %. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel 3.36. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) Validasi Data ISR	86	96.76	121

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Adapun indikator yang menjadi acuan dalam pembobotan IKPA terdapat pada tabel 3.37.

Tabel 3.37. Pembobotan IKPA Tahun 2020

No	Indikator	Bobot
1	Revisi DIPA	5%
2	Deviasi Halaman III DIPA	5%
3	Pagu Minus	5%
4	Data Kontrak	15%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%
6	LPJ Bendahara	5%
7	Dispensasi SPM	5%
8	Penyerapan Anggaran	15%
9	Penyelesaian Tagihan	12%
10	Konfirmasi Capaian Output	10%
11	Retur SP2D	5%
12	Renkas	0%
13	Kesalahan SPM	5%
Total		100%

Terdapat penambahan satu indikator dari tahun sebelumnya yaitu indikator konfirmasi capaian output. Sedangkan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) pada Balai Monitor SFR Kelas II Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38. Capaian IKPA Tahun 2020

No	Indikator	Nilai Bobot	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	100	5
2	Deviasi Halaman III DIPA	78.82	3.94
3	Pagu Minus	100	5
4	Data Kontrak	100	15
5	Pengelolaan UP dan TUP	100	8
6	LPJ Bendahara	100	5
7	Dispensasi SPM	100	5
8	Penyerapan Anggaran	98.18	14.73
9	Penyelesaian Tagihan	91.67	11
10	Konfirmasi Capaian Output	100	10
11	Retur SP2D	100	5
12	Renkas	0	0
13	Kesalahan SPM	85	4.25
14	Nilai Total	91.92	
15	Konversi Bobot	EDÄ	
16	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	96.76	

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada beberapa indikator yang tidak mencapai nilai maksimal (100). Indikator-indikator yang tidak mencapai nilai maksimal adalah dari segi deviasi halaman III DIPA (78.82), penyerapan anggaran (98.18), penyelesaian tagihan (91.67), dan kesalahan SPM (85).

Dalam hal deviasi halaman III DIPA, dipengaruhi oleh adanya revisi anggaran dan penambahan kegiatan pada triwulan IV sehingga perencanaan awal tidak sesuai dengan pelaksanaan. Sedangkan dalam hal kesalahan SPM, kesalahan yang terjadi biasanya pada uraian SPM. Namun, terlihat dalam tabel 3.38 bahwa pada dasarnya Nilai Kinerja

Pelaksanaan Anggaran telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86 % dan yang diperoleh sebesar **96.76 %**.

b. Pengelolaan Anggaran

Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu tahun anggaran 2020 sesuai DIPA No. SP-DIPA 059.03.2.654183/2020 tanggal 12 November 2019 adalah sebesar Rp9.003.736.000,- yang terdiri dari 2 sumber anggaran yaitu : Rupiah Murni Rp. 4.432.099.000,- dan PNBPNP RP. 4.571.637.000,-. Dalam pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2020 telah dilakukan revisi sebanyak 8 (delapan) kali sebagaimana dirincikan pada tabel 3.39.

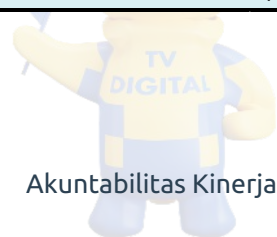
Tabel 3.39. Daftar Revisi Selama Tahun 2020

No	Tanggal	Jenis Revisi
1	19/02/2020	Revisi administrasi terkait pemutakhiran Hal. III DIPA.
2	6/5/2020	Revisi pengurangan pagu DIPA terkait <i>refocusing</i> dalam rangka penanganan Covid-19.
3	14/05/2020	Revisi pergeseran anggaran terkait Penanganan Covid-19.
4	16/07/2020	Revisi administrasi terkait pemutakhiran Hal. III DIPA dan pergeseran anggaran antar <i>output</i> serta penambahan akun penanganan Covid-19.
5	18/08/2020	Revisi DJA terkait pergeseran anggaran antar <i>output</i> dalam rangka penambahan belanja Modal.
6	6/10/2020	Revisi antar jenis belanja.
7	26/10/2020	Revisi antar satker terkait penambahan belanja Modal.
8	24/11/2020	Revisi administrasi pemutakhiran Hal. III DIPA dan POK.

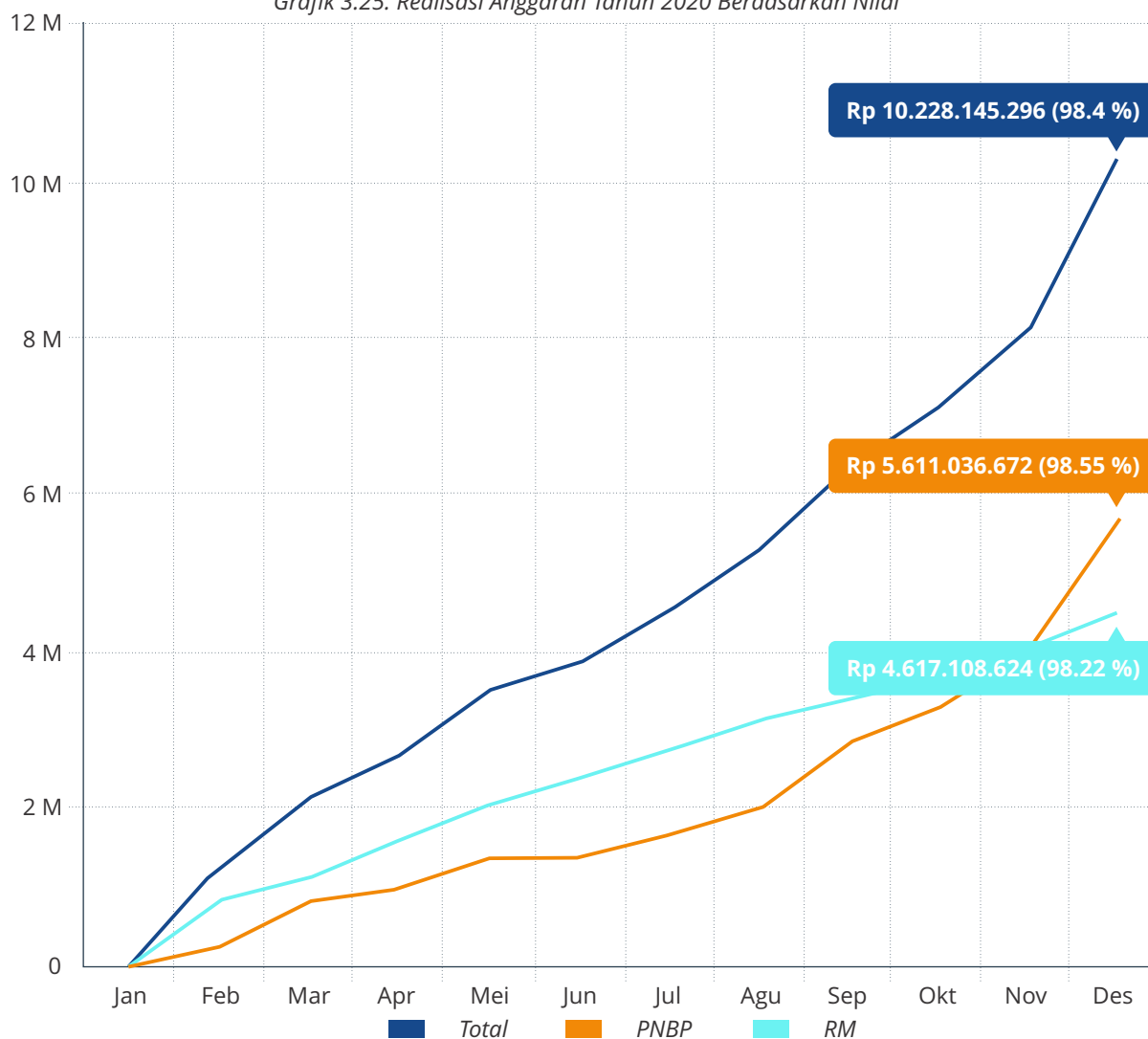
Pagu anggaran tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu semula berjumlah sebesar Rp. 9.003.736.000,- namun setelah revisi menjadi sebesar Rp. 10.394.618.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 10.228.145.296,- atau 98.40 % yang terdiri atas Rp. 4.617.108.624,- atau 98.22 % yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Rp. 5.611.036.672,- atau 98.55 % dari sumber dana PNBPNP.

Tabel 3.40. Realisasi Anggaran Tahun 2020

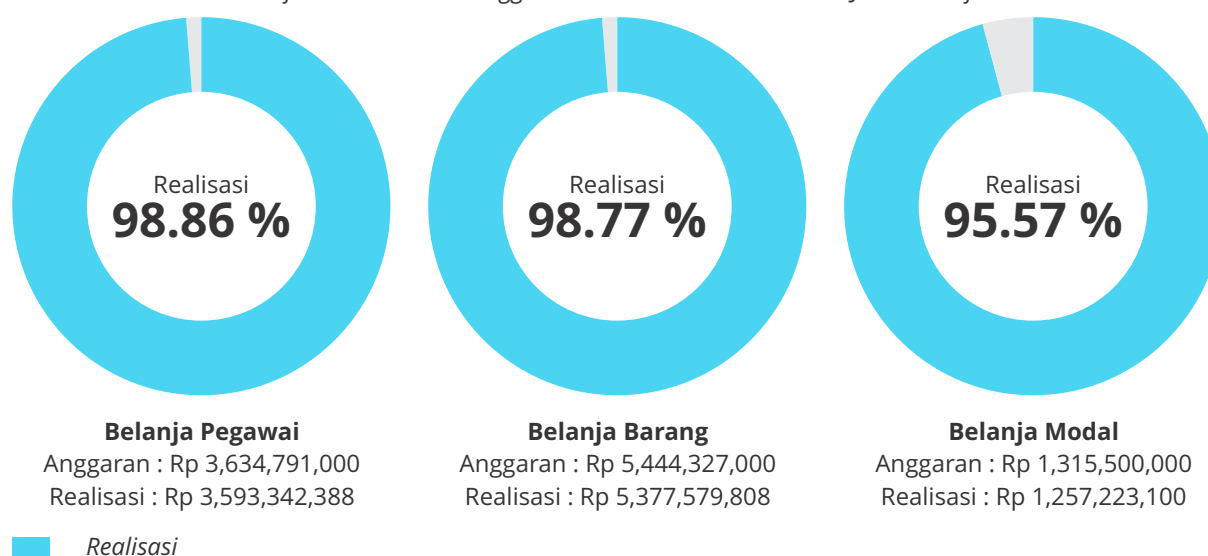
No	Bulan	Realisasi				Total	
		PNBP (Rp.)	%	PNBP (Rp.)	%	Rp.	%
1	Jan	98.940.728	(2,23)	0	(0)	89.578.139	(1,10)
2	Feb	951.563.634	(21,47)	249.625.200	(5,46)	1.201.188.834	(13,34)
3	Mar	1.289.089.925	(29,09)	807.364.136	(17,66)	2.096.454.061	(23,28)
4	Apr	1.728.158.292	(38,99)	953.357.136	(20,85)	2.681.515.428	(29,78)
5	Mei	2.186.670.060	(56,69)	1.267.849.177	(27,73)	4.235.168.742	(40,99)
6	Jun	2.525.563.602	(65,48)	1.329.424.177	(29,08)	3.854.987.779	(45,74)
7	Jul	2.862.551.498	(74,22)	1.639.714.354	(35,87)	4.502.265.852	(53,42)
8	Agu	3.233.262.836	(68,78)	2.050.626.216	(44,86)	5.283.889.052	(56,98)
9	Sep	3.514.915.575	(74,77)	2.780.432.995	(60,82)	6.295.348.570	(67,89)
10	Okt	3.823.379.994	(81,33)	3.263.963.872	(57,33)	7.087.343.866	(68,18)
11	Nov	4.122.113.802	(87,69)	3.981.021.168	(69,92)	9.430.385.153	(77,96)
12	Des	4.617.108.624	(98,22)	5.611.036.672	(98,55)	10.228.145.296	(98,40)



Grafik 3.25. Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Nilai



Grafik 3.26. Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan *output* kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan periode 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 3.41.

Tabel 3.41. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan

Output	Anggaran	Realisasi	%
Layanan monitoring, pengukuran, validasi, dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan Informatika Balmon Kelas II Palu	1.189.484.000	1.187.834.300	99.86
Layanan penyelesaian penanganan gangguan Balmon Kelas II Palu	63.915.000	63.901.200	99.98
Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Ditjen SDPPI	1.880.714.000	1.863.507.372	99.09
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.315.500.000	1.257.223.100	95.57
Layanan Perkantoran	5.945.005.000	5.855.679.324	98.50
Total	10.394.618.000	10.228.145.296	98.40

Tabel 3.42. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran

Sasaran	Pagu	Realisasi	%
SASARAN 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	3,134,113,000	3,115,242,872	99.40
SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	7,260,505,000	7,112,902,424	97.97
Total	10,394,618,000	10,228,145,296	98.40

c. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan BMN adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan, dimana seluruh kegiatan tersebut ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Balai Monitor SFR Kelas II Palu sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Ditjen SDPPI telah melakukan kegiatan penatausahaan BMN Tahun 2019. Kegiatan penatausahaan BMN yang dilakukan meliputi :

- Pembukuan, terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang.
- Inventarisasi, terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN.
- Pelaporan, terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

Balai Monitor SFR Kelas II Palu sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Ditjen SDPPI telah melakukan kegiatan penatausahaan BMN Tahun 2020. Pelaksanaan penatausahaan BMN ini dilakukan melalui aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). SIMAK BMN dan SAK adalah subsistem dari SAI. Dalam konteks manajerial SIMAK BMN melaporkan arus barang, dan SAK melaporkan arus uang. Kedua subsistem tersebut jika berjalan secara simultan maka dapat melakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang.

Tabel 3.43. Neraca Balai Monitor SFR Kelas II Palu Posisi 31 Desember 2020

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I Aset Lancar							
1	Persediaan	173.15	0.0%	-	0.0%	173.15	0.0%
	Sub Jumlah (1)	173.15	0.0%	-	0.0%	173.15	0.0%
II Aset Tetap							
1	Tanah	1.089.287.160	4.1%	-	0.0%	1.089.287.160	4.1%
2	Peralatan dan Mesin	17.614.964.137	66.1%	-	0.0%	17.614.964.137	66.1%
3	Gedung dan Bangunan	6.996.498.545	26.2%	-	0.0%	6.996.498.545	26.2%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	315.704.000	1.2%	-	0.0%	315.704.000	1.2%
5	Aset Tetap Lainnya	9.900.000	0.0%	-	0.0%	9.900.000	0.0%
6	KDP	0	0.0%	-	0.0%	0	0.0%
	Sub Jumlah (2)	26.026.353.842	97.6%	-	0.0%	26.026.353.842	97.6%
III Aset Lainnya		0				0	
1	Aset Tidak Berwujud	635.629.800	2.4%	-	0.0%	635.629.800	2.4%
2	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0	0.0%		0.0%	0	0.0%
	Sub Jumlah (3)	635.629.800	2.4%	-	0.0%	635.629.800	2.4%
Total		26.662.156.792	100%	-	0%	26.662.156.792	100%

Pada Tahun 2020 telah dilakukan proses penghapusan Barang Milik Negara terhadap Barang Milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan dibawah Rp.100.000.000,- sebanyak 19 unit, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.44.

Semua Barang Milik Negara tersebut baru diusulkan penjualan ke kantor KPKNL pada tanggal 03 Februari 2021 dengan nomor surat 97/KOMINFO/BALMON.72/PL.04.01/02/2021.

Pada tahun 2020 Balmon Kelas II Palu telah melakukan usulan Penetapan Status Penggunaan, yaitu:

- Telah melakukan usulan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa peralatan dan mesin dengan nilai perolehan Rp 122.723.100,- dengan No. Surat: 477/BALMON.72/PL.01.02/11/2020 Tanggal 11 November 2020.
- Telah melakukan usulan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa peralatan dan mesin dengan nilai perolehan Rp 17.710.000,- dengan No. Surat:

485/BALMON.72/PL.01.02/11/2020 Tanggal 16 November 2020.

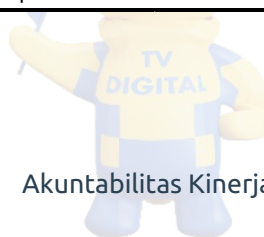
Untuk menjaga agar aset BMN peralatan kantor dan mesin tetap dalam kondisi baik dan siap pakai, Balai Monitor SFR Kelas II Palu melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap barang-barang BMN yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional kantor. Adapun peralatan dan mesin yang telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.45.

Tabel 3.44. Data Penghapusan Tahun 2020

No	Kode Aset	Nama Aset	Tahun Perolehan
1	3.10.01.02.002.13	Lap Top	2014
2	3.10.01.02.002.14	Lap Top	2014
3	3.10.01.02.002.15	Lap Top	2015
4	3.10.01.02.002.16	Lap Top	2015
5	3.10.01.02.001.23	P.C Unit	2013
6	3.10.01.02.001.25	P.C Unit	2014
7	3.10.02.03.003.12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015
8	3.05.02.04.004.5	A.C Split	2005
9	3.06.03.07.003.1	Antene HF/SW Stationary	2005
10	3.06.03.07.003.2	Antene HF/SW Stationary	2001
11	3.03.02.04.005.1	Tripod	1992
12	3.03.03.01.023.1	Volt Meter Elektronik	1992
13	3.03.03.01.066.1	Frequency Counter	2001
14	3.05.02.06.004.2	Tape Recorder	2003
15	3.05.02.01.002.34	Meja Kerja Kayu	2012
16	3.06.01.05.038.4	GPS Receiver	2012
17	3.06.02.04.002.9	Unit Tranceiver VHF Transportable	2006
18	3.06.02.04.002.12	Unit Tranceiver VHF Transportable	2006
19	3.06.03.21.003.1	Antenna Tuning Unit	2001

Tabel 3.45. Data Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No	Nama Aset	Jumlah (Unit)	Tindakan Pemeliharaan	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4 operasional	4	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
2	Kendaraan Roda 4 Double Gardan	4	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
3	Kendaraan Roda 2	1	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
4	Komputer PC	13	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	11 Kondisi baik 2 Rusak
5	Laptop	16	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	12 Kondisi baik 4 Rusak
6	Printer	13	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	12 Kondisi baik 1 rusak
7	AC	20	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	18 Kondisi baik 2 rusak
8	Genset	1	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
9	Gedung Kantor	2	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
10	Halaman Kantor	3.000 m ²	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
11	Pagar Kantor	1.852 m ²	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
12	Mesin Pompa Air	4	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
13	Mesin Pemotong Rumput	2	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik



d. Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk menunjang kegiatan operasional maupun administrasi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan, yang dilakukan secara penunjukkan langsung, pengadaan langsung, maupun dengan mekanisme. Pengadaan Barang dan Jasa Balai Monitor SFR Kelas II Palu pada Tahun 2020 mencapai Rp 1.782.100.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Ribu Rupiah). Berikut adalah table pengadaan barang dan jasa tahun 2020.

Jumlah pengadaan yang menggunakan metode *e-purchasing* atau menggunakan e-katalog ada 1 (satu) kegiatan pengadaan yaitu, pengadaan sewa jaringan internet. Jumlah pengadaan yang menggunakan metode penunjukkan langsung ada 2 (dua) kegiatan pengadaan yaitu pengadaan sewa lahan perangkat SMFR *transportable* dan pengadaan *Upgrade* Perangkat SMFR PR 100. Jumlah pengadaan dengan metode pengadaan langsung ada 11 (sebelas) kegiatan pengadaan.

Tabel 3.46. Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020

No	Pekerjaan	Nilai Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Penghematan (Rp)
1	Pengadaan Sewa Jaringan Internet	160.000.000	158.963.208	1.036.326
2	Pengadaan Sewa Lahan Perangkat SMFR <i>Tranportable</i>	77.600.000	77.391.600	208.400
3	Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy	48.000.000	48.000.000	0
4	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2	70.000.000	68.600.000	400.000
5	Pengadaan Alat Pengolah Data	100.500.000	99.875.000	625.000
6	Pengadaan <i>Upgrade</i> Perangkat SMFR PR 100	1.122.000.000	1.065.900.000	56.100.000
7	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	23.000.000	22.848.100	151.900
8	Pengadaan Peningkatan Kemampuan SDM	191.000.000	190.904.000	96.000
9	Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO: 9001 2015	50.000.000	49.800.000	200.000
10	Sertifikasi ISO: 9001 2015	30.000.000	30.000.000	0

e. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Administrasi kepegawaian pada dasarnya adalah proses yang paling dasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian dimana hal ini dilakukan dengan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kelengkapan atau perlengkapan dari administrasi umum yang berhubungan dengan seorang pegawai.

Pengelolaan administrasi kepegawaian diarahkan pada terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi melalui pengorganisasian kepegawaian dan pembinaan kepegawaian untuk memaksimalkan potensi pegawai dan peningkatan kesejahteraan. Penetapan tugas dan tanggungjawab pegawai dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan pola kerja yang memungkinkan dapat saling bekerjasama untuk memudahkan dalam pencapaian target kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Palu.

Pada tahun 2020, kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu yang memiliki sumber daya manusia sejumlah 42 Pegawai yang terdiri dari 24 pegawai ASN dan 18 pegawai Non ASN adalah :

1. Pengusulan Kenaikan Pangkat

Selama tahun 2020 telah dilakukan pengusulan kenaikan pangkat sebanyak 1 orang untuk periode kenaikan pangkat April 2020 melalui jalur reguler dan 2 orang untuk periode kenaikan pangkat Oktober 2020 melalui jalur Jabatan Fungsional Tertentu.

Daftar kenaikan pangkat Pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.47.

Tabel 3.47. Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2020

No	Nama	Pangkat Lama		Pangkat Baru		Ket.
		Pangkat / Gol. Ruang	TMT	Pangkat / Gol. Ruang	TMT	
1	Bernard Andrys, ST.	Penata Muda Tk.1 / III.b	1/4/2016	Penata / III.c	1/4/2020	Reguler
2	Juhardi, ST., MM.	Penata / III.c	1/4/2017	Penata Tk. 1 / III.d	1/10/2020	Fungsional tertentu
3	Dafid	Pengatur / II.c	1/4/2018	Pengatur Tk.1 / II.d	1/10/2020	Fungsional tertentu

2. Kenaikan Gaji Berkala

Daftar penyelesaian kenaikan gaji berkala Pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Tahun 2020 adalah:

Tabel 3.48. Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2020

No	Nama	Pangkat / Gol. Ruang	TMT
1	Ilham Djufri	Pengatur / II.c	1 Januari 2020
2	Ahmad	Pengatur / II.c	1 Januari 2020
3	Dafid	Pengatur / II.c	1 Januari 2020
4	Ridwan Gaffar	Pengatur Muda Tk.1 / II.d	1 Januari 2020
5	Rudy	Pengatur Muda Tk.1 / II.d	1 Januari 2020
6	Bernard Andrys, ST.	Penata Muda Tk.1/ III.c	1 Maret 2020
7	Syahriyani, ST.	Penata Tk.1 / III.d	1 April 2020
8	Fatmawati, ST.	Penata / III.c	1 April 2020
9	Adli Arsyad, ST.	Penata Tk.1/III.d	1 Oktober 2020

3. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Pengembangan Pegawai diselenggarakan agar kemampuan intelektual atau emosional pegawai yang melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian sehingga pegawai mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pengembangan pegawai Balai Monitor SFR Kelas II Palu dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun *whorkshop* dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh kantor pusat maupun lembaga/instansi lainnya.

Pada tahun 2020, pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh para pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dilaksanakan secara daring/*online* berhubung dengan adanya pembatasan perjalanan ke luar daerah yang diakibatkan oleh adanya Pandemi Covid 19.

f. Pengelolaan Administrasi Persuratan

Pengelolaan administrasi persuratan di Balai Monitor SFR Kelas II Palu melewati proses penerimaan dan atau pengiriman surat dilakukan secara konvensional dan melalui aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SiMaya). Surat dinas atau Nota Dinas yang berasal dari internal Kementerian Kominfo diterima secara daring melalui SiMaya.

Aktifitas penerimaan dan penerbitan surat menyurat selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.49. Jumlah Administrasi Persuratan Tahun 2020

No	Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar		
			Surat Dinas	Nota Dinas	Surat Tugas
1	Januari	41	55	17	12
2	Februari	51	49	8	17
3	Maret	54	49	9	11
4	April	24	4	7	1
5	Mei	49	26	8	5
6	Juni	26	18	14	8
7	Juli	48	36	11	14
8	Agustus	38	58	9	13
9	September	24	39	9	15
10	Oktober	35	33	12	13
11	November	57	30	32	23
12	Desember	28	45	13	10
Jumlah		475	442	149	142

KINERJA LAINNYA

1. Survei Pelayanan Publik

Sebagai bentuk pelayanan UPT untuk membantu para pengguna melaksanakan pembayaran BHP frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu melakukan kunjungan langsung ke para pengguna frekuensi radio untuk membantu para pengguna baik yang sudah memiliki ijin dengan cara mengingatkan pembayaran jika sudah jatuh tempo dan waba yang belum melakukan pembayaran, dan bagi yang belum memiliki ijin dibantu dengan cara mendampingi para pengguna dalam pengurusan Izin Stasiun Radio dalam hal ini penggunaan akun *e-licensing*. Selain dari itu, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas II Palu juga melaksanakan survei pelayanan publik yang menjadi rangkain kunjungan ke para pengguna.

Maksud survei pelayanan publik penggunaan frekuensi radio ini adalah sebagai sarana untuk mengetahui kendala atau permasalahan terhadap penggunaan akun *e-licensing* yang telah dimiliki sebelumnya, serta memberikan survei pada pelanggan/klien tentang pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu sebagai barometer atau acuan dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana dimaksud.

Pada Tahun 2020, survei pelayanan publik dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah yaitu, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso. Ruang lingkup kegiatan ini adalah pemberian formulir survei kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dalam hal penggunaan frekuensi radio serta pelayanan terkait proses perizinan serta pemberian asistensi/sosialisasi/bimbingan teknis penggunaan akun *e-licensing*.

2. Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Manajemen mutu adalah sebuah sistem manajemen untuk mengawasi semua kegiatan dan tugas dalam suatu organisasi atau instansi untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan, serta sarana yang digunakan untuk mencapainya bersifat konsisten. Hal ini diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat mutu yang diinginkan dalam instansi. Termasuk di dalamnya penentuan kebijakan mutu, menciptakan dan menerapkan perencanaan dan jaminan kualitas, dan kontrol kualitas serta peningkatan kualitas. Standar yang mengatur Sistem Manajemen Mutu adalah ISO 9001 yang merupakan standarisasi internasional yang paling dasar dan versi terbarunya adalah ISO 9001 : 2015.

Sertifikasi ISO adalah jaminan persetujuan dari pihak ke-3 yang dijalankan instansi terhadap salah satu manajemen ISO yang diakui secara internasional. Pada tahun 2020, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio telah melaksanakan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada para pengguna frekuensi radio di Sulawesi Tengah. Adapun sertifikat ISO 9001:2015 telah terbit pada bulan Desember 2020 dan berlaku selama 5 tahun. Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu adalah :

- Pelayanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio
- Pelayanan Konsultasi Pengurusan Ijin Stasiun Radio (ISR)
- Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)



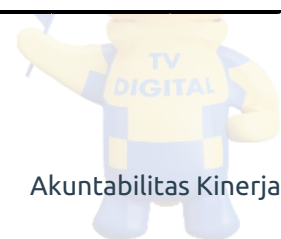
Gambar 3.7. Survei Kepuasan Pelanggan



PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2016 - 2020

No	Sasaran	Indikator	2016		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inpeksi, Penertiban serta pelayanan public spectrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.	1. Persentase (%) Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	0.8	1	1.25
		2. Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan TV Siaran di Wilayah Kerja	-	-	-
		3. Persentase (%) Jumlah ISR Termonitor	-	-	-
		4. Persentase (%) Hasil Monitoring Frekuensi yang Teridentifikasi	-	-	-
		5. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	-	-	-
		6. Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio Dari Setiap Stasiun SMFR Tetap dan <i>Transportable</i>	-	-	-
		7. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio (untuk keselamatan dan maritim)	0.92	0.92	1
		8. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	-	-	-
		9. Monitoring Perangkat Telekomunikasi	-	-	-
		10. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang Dilaksanakan oleh UPT	-	-	-
		11. Pelaksanaan Sertifikasi Operator Berbasis CAT	-	-	-
		12. Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekunesi Radio	-	-	-
		13. Penanganan Piutang yang Telah Dilimpahkan ke KPKNL	-	-	-
		14. Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi Dengan Data ISR	-	-	-
	Terwujudnya Tata Kelola UPT				
2	Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	-	-

2017			2018			2019			2020		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
0.8	1	1.25	0.8	1	1.25	0.8	1	1.25	0.5	1	2
0.35	87,5%	2.5	0.35	87,5%	2.5	0.35	0.85	242,86	0.35	83,33%	238,1%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.85	141,67%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1	111,11%
-	-	-	0.83	0.83	1	0.85	95,51%	112,36%	0.83	98,44%	118,6%
-	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	1	12 Laporan	12 Laporan	1
0.93	1	107,53%	0.94	1	1.06	0.95	1	105,26%	1	1	1
-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	1.4	0.5	0.98	1.96
-	-	-	-	-	-	1 Laporan	9 Laporan	9	1 Kegiatan	6 Kegiatan	6
-	-	-	-	-	-	1	1	1	0.8	0.9	1.12
-	-	-	1	1	1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	1	1
-	-	-	1	1	1	12 Laporan	12 Laporan	1	12 Laporan	12 Laporan	1
-	-	-	1	1	1	4 Laporan	4 Laporan	1	4 Laporan	4 Laporan	1
-	-	-	0.81	0.96	1.18	0.85	98,63%	116,04%	0.85	0.86	1.01
-	-	-	-	-	-	>94%	94,29%	1	0.86	96,76%	112,5





04

PENUTUP



PENUTUP

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu selama tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa:

1. Program kerja tahun anggaran 2020 secara umum berjalan lancar dan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan serta dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Masih perlu kegiatan sosialisasi tentang tugas dan fungsi pokok Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dikurangi.
3. Tindakan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio sudah dilakukan sesuai

Undang - Undang untuk memberikan sanksi dalam rangka tertib penggunaan spektrum frekuensi radio sekaligus memotivasi untuk lebih taat pada peraturan yang berlaku.

4. Dengan jumlah sumber daya manusia dan perangkat monitoring yang sudah memadai, maka perlu peningkatan jumlah kegiatan tupoksi untuk tiap kabupaten/ kota dalam memaksimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian Spektrum frekuensi Radio.
5. Untuk memperlancar kegiatan Tupoksi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu khususnya bidang monitoring dan observasi Spektrum Frekuensi Radio, maka perlu ditingkatkan infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) bergerak.





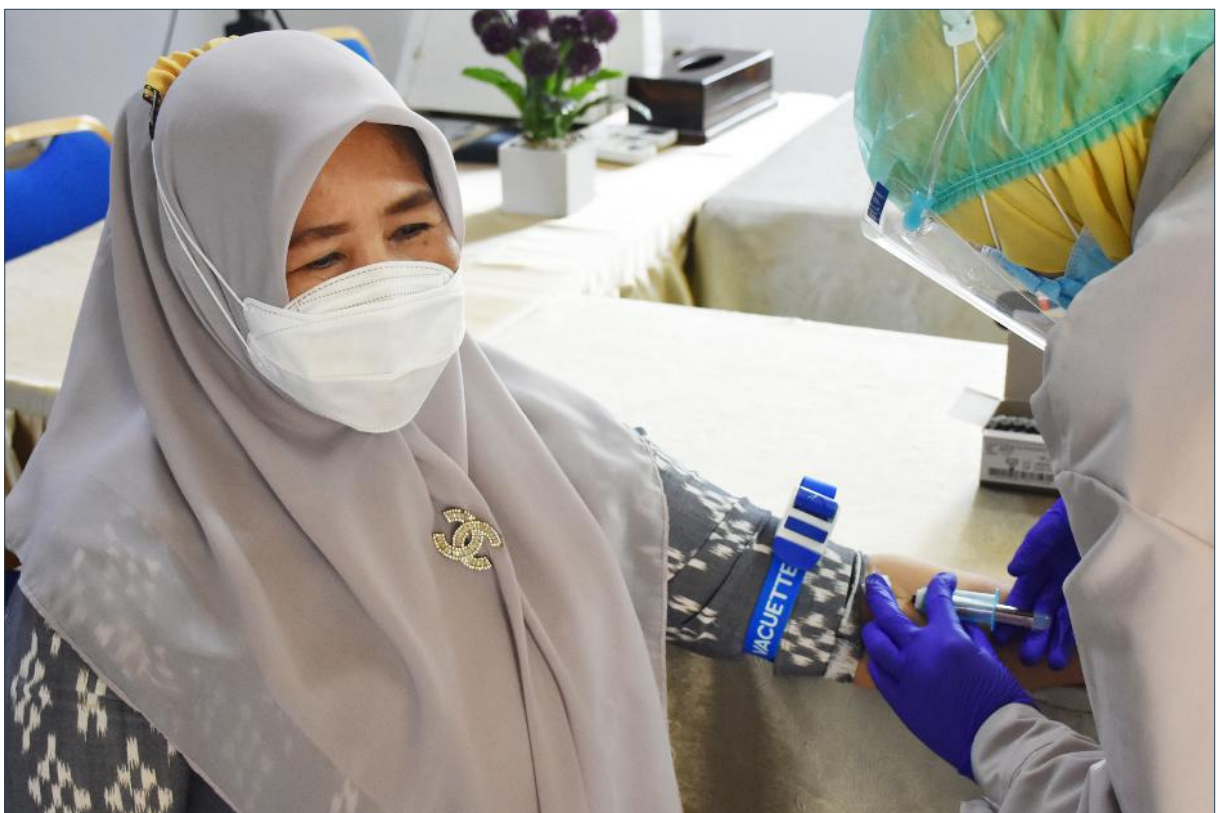


GALERI





Medical Check Up



Pemeriksaan Rapid Antibodi



***Penertiban Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio***



*Sosialisasi dan Bimtek
Perizinan Frekuensi Radio*

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU



Jl. Taddulako, Desa Binangga
Kec. Marawola, Kab. Sigi
Sulawesi Tengah



(0451) 8205191
(0451) 8204988



upt_palu@postel.go.id